

LAPORAN PP 39

TRIWULAN II TA. 2025

BALAI STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA INDUSTRI
SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan II tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Balai dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan disektor industri. Di samping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin turut serta dalam menunjang pembangunan dan pengembangan industri terutama di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP39) Triwulan II tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 tahun 2006. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Triwulan II tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pimpinan Kementerian Perindustrian khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dalam menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh BSPJI Samarinda dan sekaligus dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan dalam upaya optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja pada tahun yang akan datang.

Diharapkan Laporan Triwulan I BSPJI Samarinda Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 3 Juli 2025

Kepala BSPJI Samarinda,



Risetio Canggih Dwiputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN	22
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	38
BAB IV PENUTUP	108

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan menyusul adanya Permenperin nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang memuat perubahan tugas Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk, teknologi dan industri hijau
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan kearsipan dan rumah tangga
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1. 2. Latar Belakang Kegiatan/ Program

Visi

Menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan lingkungan stratejik yang semakin cepat menyebabkan pola pembangunan nasional dan daerah yang mengacu pada format jangka panjang (*longterm planning*) menjadi kurang sesuai dan tidak mampu lagi memberikan hasil yang optimal sebagai akibat dinamika lingkungan stratejik.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan perkembangan teknologi informasi yang cepat, maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSKJI) dituntut untuk meningkatkan perannya sebagai pendukung pembangunan industri di daerah melalui perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia

dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Adapun Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



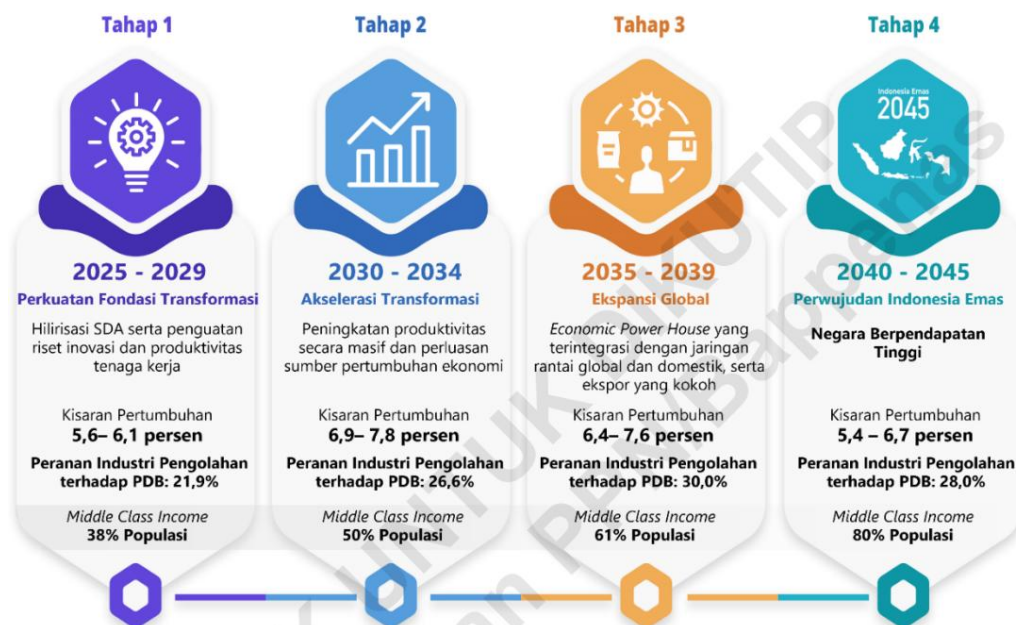
Gambar 1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia bermitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Maka dari itu, industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor) menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2. Tahapan Transformasi Ekonomi

Untuk itu, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB emncapai 21,9%. Selain strategi industrialisasi untuk industri

prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau. Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

Baik Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 maupun Rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses reviu untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Usulan visi Kementerian Perindustrian: “Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan” dengan pemaknaan:

- Mandiri: Keberlangsungan industri dalam negeri tidak bergantung pada sumber daya luar negeri dan sektor industri menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.
- Maju: Sektor industri berdaya saing, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan.
- Berkelanjutan: Pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bertujuan untuk menjangkau dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali.

Visi Kementerian Perindustrian seyogianya selaras dengan/mengadopsi visi tersebut di atas. Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, diusulkan visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.”

Dalam rangka mendukung visi BSKJI, BSPJI Samarinda sebagai unit pelaksana teknis dengan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke depan akan memiliki fokus dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing sesuai dengan kompetensi regional.

Misi

Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standarisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

- Standardisasi industri secara mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri
- Pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri
- Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional
- Penguatan industri hijau secara bertahap
- Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing
- Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standarisasi industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standarisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH

dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam mendukung misi BSKJI, BSPJI Samarinda sepenuhnya akan melaksanakan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing dan melaksanakan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel. BSPJI Samarinda akan sepenuhnya memperhatikan tiga aspek yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi yang diimplementasikan pada perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tujuan

Tujuan BSPJI samarinda merujuk kepada tujuan BSKJI yaitu:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran strategis perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Samarinda. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSPJI Samarinda sesuai dengan sasaran strategis BSKJI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Acuan SS Kemenperin	Tujuan BSKJI	Acuan SP BSKJI		Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda	
SS1	T3	SP4	Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
				SK1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				SK2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
SP1	T3	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	SK3	Terwujudnya SDM yang profesional
SP1	T3	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	SK4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
SP1	T4	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
SP1	T4	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
SS5	T3	SP5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	SK7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Samarinda yang ditentukan berdasarkan Sasaran Program dan Tujuan BSKJI serta Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan sasaran kegiatan pada kerangka perspektif BSPJI Samarinda ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 3. Peta Strategis BSPJI Samarinda (2025 – 2029)

Sasaran kegiatan pada perspektif stakeholders merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi harapan pada pemangku kepentingan, yaitu :

1. TJ, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, sasaran ini memiliki indikator yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama antara lain :
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,66 dan meningkat hingga 3,68 pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 210 perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi dan meningkat menjadi 255 industri/ pelaku usaha/ instansi pada tahun 2029.

2. SK 1, Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan meningkat menjadi 88% di tahun 2029.
 - 2) Nilai *Net Promoter Score* (NPS), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 6 dan meningkat menjadi 10 di tahun 2029.
3. SK 2, Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 9,22% dan meningkat menjadi 43,49% pada tahun 2029.
 - 2) Jumlah hasil layanan jasa industri, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 4.545 dan meningkat menjadi 4.919 pada tahun 2029.
 - 3) Nilai Revenue on Asset (RoA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 8,10% dan meningkat menjadi 8,50% pada tahun 2029.
 - 4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 41,50% dan meningkat menjadi 43,50% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *internal process* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi pada penyelenggaraan proses internal BSPJI Samarinda, yaitu :

1. SK5, Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan tercapai 50,00% dan tetap 50,00% hingga tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 94,98 dan meningkat menjadi 95,15 di tahun 2029.
2. SK7, Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan menjadi 82,00% pada tahun 2029.

Sasaran kegiatan pada perspektif *learn & growth* merupakan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI Samarinda, yaitu :

3. SK 3, Terwujudnya SDM yang profesional, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh indeks 82,96 dan meningkat menjadi 84,50 pada tahun 2029.
4. SK 4, Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, sasaran ini memiliki indikator antara lain :
 - 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 20% dan meningkat hingga 100% di tahun 2029
 - 2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan 80,00% dan meningkat menjadi 82,00% di tahun 2029.
 - 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai nilai 4,51 dan meningkat menjadi 4,53 pada tahun 2029.
5. SK6, Terwujudnya akuntabilitas organisasi, sasaran ini memiliki indikator kinerja antara lain :
 - 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 80,45 dan meningkat hingga mencapai nilai 80,65 di tahun 2029.
 - 2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan memperoleh nilai 94,18 dan meningkat menjadi 94,40 di tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaanya terhadap tujuan BSKJI ditunjukkan pada tabel berikut:

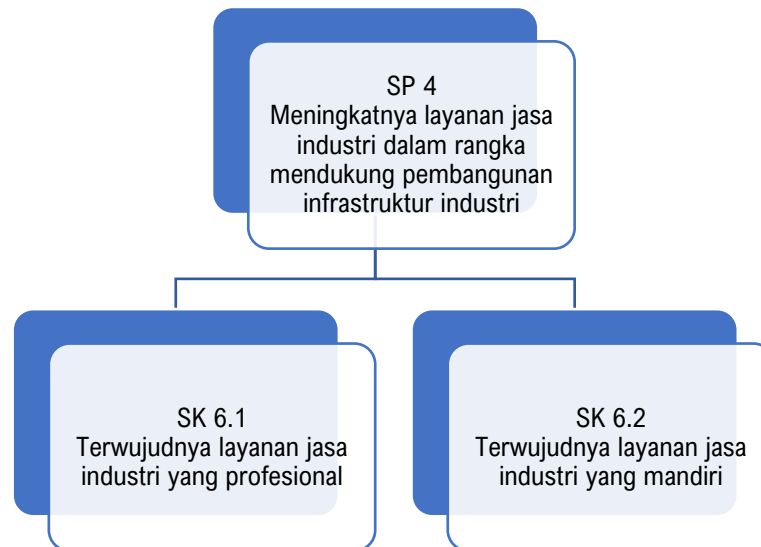
Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Samarinda

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
T3	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,71	3,66	3,66	3,67	3,67	3,68
T3	TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	200	210	221	232	243	255
T3	SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional							
T3	IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	85,00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00
T3	IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	5	6	7	8	9	10
T3	SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri							
T3	IKK.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	7.187.636.112	9,22	18,19	26,21	34,63	43,49

Tujuan	TJ/SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
T3	IKK.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	4.500	4.545	4.590	4.682	4.776	4.919
T3	IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50
T3	IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50
T3	SK.3	Terwujudnya SDM Profesional							
T3	IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,96	82,96	83,00	83,50	84,00	84,50
T3	SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
T3	IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
T3	IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	0,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
T3	IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,76	4,51	4,51	4,52	4,53	4,53
T4	SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien							
T4	IKK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
T4	IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	94,98	94,98	95,00	95,05	95,10	95,15
T4	SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi							
T4	IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	80,45	80,45	80,50	80,55	80,60	80,65
T4	IKK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,18	94,18	94,25	94,30	94,35	94,40
T3	SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
T3	IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	65,24	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang selaras dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No.3/2014 tentang Perindustrian, Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Dalam perumusannya, arah kebijakan ini diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya layanan jasa industri dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur industri”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu : SK 6.1 terwujudnya layanan jasa industri yang profesional serta SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 4. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kondisi meningkatnya layanan jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi fondasi penting bagi pengembangan layanan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular. Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut:

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat

standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Meningkatnya perusahaan industri yang produksinya terstandarisasi”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Meningkatkan standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (means) untuk meningkatkan produk dari perusahaan industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri.



Gambar 5. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standardisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP 3) yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.1 Meningkatkan adopsi teknologi pada industri manufaktur dan SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional. Kedua sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunanya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



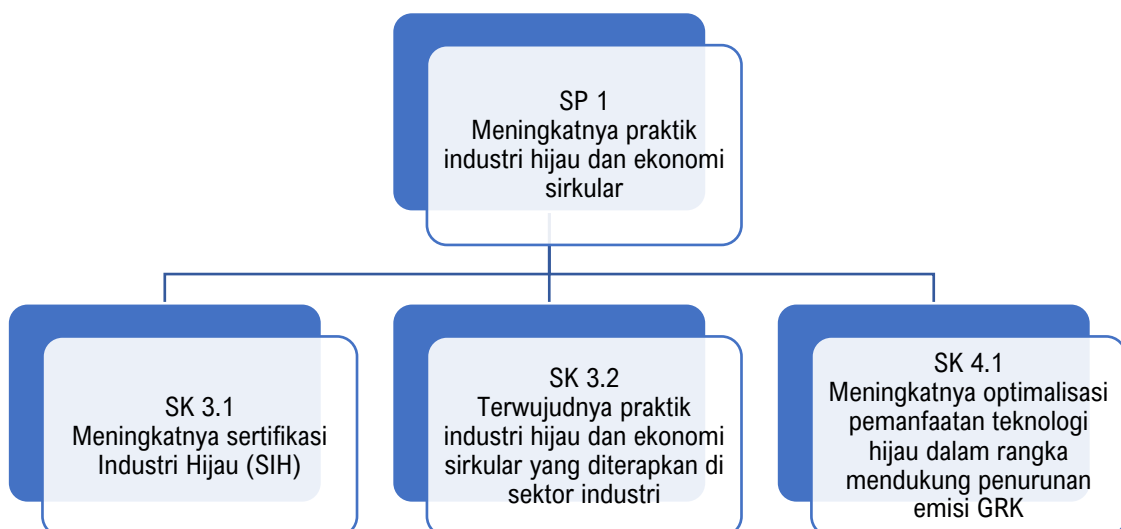
Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara optimal.

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/ material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau (SIH); SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.

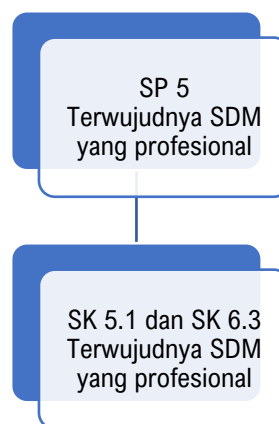


Gambar 7. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri Hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/ material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

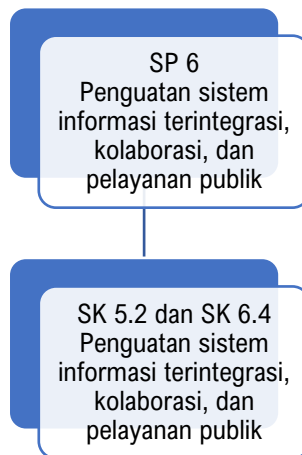
Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam dua Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 6 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik”, SP 7 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 8 “Penguatan akuntabilitas organisasi”.



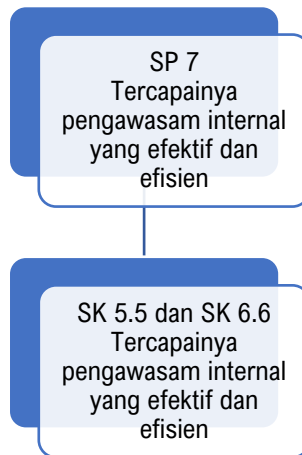
Gambar 8. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 5.1 dan SK 6.3 yang menyasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 5.1 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menyasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menyasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



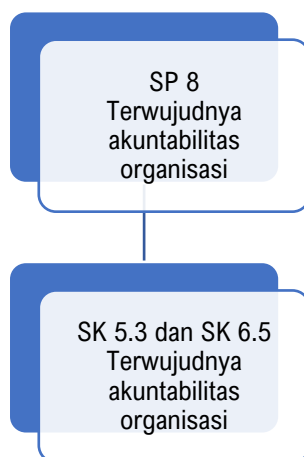
Gambar 9. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 yang melekat pada Sekretariat BSKJI dan SK 6.4 yang melekat pada UPT. Baik SK 5.2 maupun SK 6.4 sama-sama menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik.



Gambar 10. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 7 didukung oleh SK 5.5 dan SK 6.6 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 5.5 melekat pada Sekretariat BSKJI, sedangkan SK 6.6 melekat pada UPT. Sementara itu, SP 8 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A, dan nilai laporan keuangan BSKJI.



Gambar 11. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Sasaran Program BSKJI melekat pada UPT, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Samarinda yang melekat pada Sasaran Program BSKJI diterjemahkan melalui Sasaran Kegiatan dan diwujudkan melalui Indikator Kinerja Kegiatan. BSPJI Samarinda melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sebagai bentuk strategi pencapaian yang dianggap mampu untuk mencapai target yang diharapkan, namun tidak terbatas dan dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan penyesuaian.

Tabel 3. Indikator Kinerja dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Indikator

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri		
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	<i>Temu Pelanggan</i>
TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
			<i>Focus Group Discussion</i>
			<i>Webinar</i>

Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional		
IKK.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Uji Profesiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
			<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
			<i>Kalibrasi peralatan uji/proses produksi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
			<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup)</i>
IKK.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	<i>Pameran</i>
			<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri		
IKK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Sertifikasi Produk</i>
IKK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Sampling</i>
			<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi</i>
			<i>Pengujian/Proses Produksi</i>
			<i>Pembimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
			<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
IKK.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
IKK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
			<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
			<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
			<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional		
IKK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vokasi</i>
			<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
			<i>In House Training</i>
			<i>Peningkatan Potensi SDM</i>

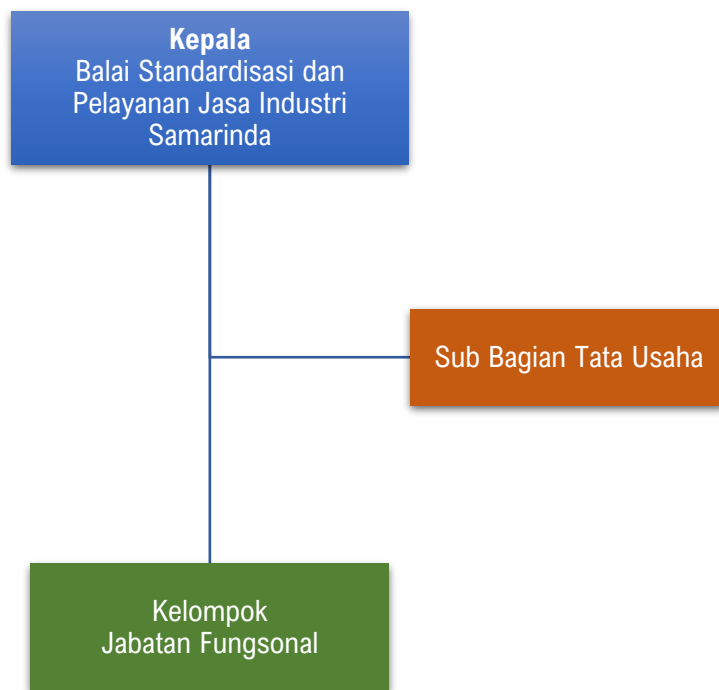
Kode	Uraian Sasaran Program, Kegiatan dan indikator kinerja	Satuan	Aktivitas/ Kegiatan
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik		
IKK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.2	Tingkat Penerapan SPBE	Persen	<i>Pengembangan Aplikasi</i>
IKK.4.3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
			<i>Perawatan Gedung</i>
			<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
			<i>Perawatan Kendaraan</i>
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien		
IKK.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
			<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>
IKK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi		
IKK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	<i>Penyusunan Program/Kegiatan</i>
			<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
IKK.6.2	Nilai minimal laporan keuangan Satker	Nilai	<i>Pelaporan Keuangan Akuntansi Negara (SAP)</i>
			<i>Penatausahaan BMN</i>
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri		
IKK.7.1	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
			<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
			<i>Pengadaan Mebelair</i>
			<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
			<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>

Nomenklatur Program dan Kegiatan

BSPJI Samarinda melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menjalankan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
- b. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

1. 3. Struktur Organisasi



Gambar 12. Struktur Organisasi BSPJI Samarinda

BAB II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2. 1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja 2025 merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan secara tahunan yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses perencanaan kinerja telah didokumentasikan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dalam satu periode Tahun 2025, yang disusun setiap awal tahun anggaran.

Kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda juga harus sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Tri Program Utama yang sedang dilaksanakan, yaitu pembangunan di bidang peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan pertanian dalam arti luas.

Pada tahun 2025 anggaran kegiatan BSPJI Samarinda yang tertuang dalam dokumen penganggaran DIPA terbagi dalam 2 Program antara lain :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kegiatan : 6077. Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- AEC. Kerja sama
- AEF. Sosialisasi dan Diseminasi
- BAD. Pelayanan Publik kepada industri
- BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

Klasifikasi Rincian Output :

- EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- EBC. Layanan Manajemen SDM Internal
- EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal

2.1.1. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
AEC	Kerja sama
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>
B	<i>Temu Pelanggan</i>
C	<i>Pameran</i>
D	<i>Webinar</i>
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>
BAD	Pelayanan Publik kepada industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>
B	<i>Sampling</i>
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
A	<i>Sertifikasi Produk</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>
WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>
C	<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>
D	<i>Layanan Operasional Pendukung Perkantoran</i>
E	<i>Perawatan Gedung</i>
F	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>
G	<i>Perbaikan Peralatan Perkantoran</i>
H	<i>Perawatan Kendaraan</i>
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
EBB.951	Layanan Sarana Internal
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
A	<i>Pengadaan Pengolah Data</i>
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
A	<i>Pengadaan Alat Perkantoran</i>
B	<i>Pengadaan Mebelair</i>
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	<i>Peningkatan Kompetensi SDM Balai</i>
B	<i>In House Training</i>
C	<i>Peningkatan Potensi SDM</i>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	<i>Penyusunan Program/ Kegiatan</i>
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	<i>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
A	<i>Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)</i>
B	<i>Penatausahaan BMN</i>
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
A	<i>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
051	Penyelenggaraan Kearsipan
A	<i>Penatalaksanaan Kearsipan</i>

2.1.2. Rincian Anggaran Tahun 2025

Rincian anggaran kegiatan standardisasi dan pelayanan jasa Industri tahun anggaran 2025 sesuai DIPA tertera pada tabel berikut:

Tabel 5. Rincian Anggaran Tahun 2025 (Revisi DIPA 10)

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,465,505,000	1,317,214,000	4,148,291,000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	5,465,505,000	1,317,214,000	4,148,291,000
AEC	Kerja sama	154,899,000	28,145,000	126,754,000
002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	28,145,000	126,754,000
A	<i>Kerjasama dan Kemitraan</i>	154,899,000	28,145,000	126,754,000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	629,133,000	377,793,000	251,340,000
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	377,793,000	251,340,000
A	<i>Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri</i>	69,227,000	69,227,000	-
B	<i>Temu Pelanggan</i>	187,280,000	187,280,000	-
C	<i>Pameran</i>	100,786,000	100,786,000	-
D	<i>Webinar</i>	8,000,000	8,000,000	-
E	<i>Promosi dan Pemasaran Layanan</i>	146,740,000	-	146,740,000
F	<i>Unit Pelayanan Publik</i>	117,100,000	12,500,000	104,600,000
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2,353,451,000	89,562,000	2,263,889,000
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360,000	-	1,518,360,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	1,442,720,000	-	1,442,720,000
A	<i>Pengujian Produk/ Proses Produksi</i>	991,220,000	-	991,220,000
B	<i>Sampling</i>	451,500,000	-	451,500,000
056	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	75,640,000	-	75,640,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium</i>	75,640,000	-	75,640,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664,000	-	168,664,000
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	91,500,000	-	91,500,000
A	<i>Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri</i>	<i>91,500,000</i>	-	<i>91,500,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	77,164,000	-	77,164,000
A	<i>Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi</i>	<i>77,164,000</i>	-	<i>77,164,000</i>
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955,000	89,562,000	392,393,000
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	82,569,000	13,044,000	69,525,000
A	<i>Sertifikasi Produk</i>	<i>82,569,000</i>	<i>13,044,000</i>	<i>69,525,000</i>
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	399,386,000	76,518,000	322,868,000
A	<i>Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi/Witness)</i>	<i>316,648,000</i>	<i>41,310,000</i>	<i>275,338,000</i>
B	<i>Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)</i>	<i>82,738,000</i>	<i>35,208,000</i>	<i>47,530,000</i>
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472,000	-	184,472,000
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	184,472,000	-	184,472,000
A	<i>Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri</i>	<i>184,472,000</i>	-	<i>184,472,000</i>
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	320,522,000	-	320,522,000
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522,000	-	320,522,000
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	320,522,000	-	320,522,000
A	<i>Konsultasi dan Pembinaan Industri</i>	<i>320,522,000</i>	-	<i>320,522,000</i>
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	2,007,500,000	821,714,000	1,185,786,000
A	<i>Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian</i>	<i>2,000,000,000</i>	<i>817,214,000</i>	<i>1,182,786,000</i>
B	<i>Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium</i>	<i>7,500,000</i>	<i>4,500,000</i>	<i>3,000,000</i>
WA	Program Dukungan Manajemen	14,190,981,000	1,504,753,000	12,686,228,000
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	14,190,981,000	1,504,753,000	12,686,228,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,776,995,000	648,327,000	12,128,668,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
051	Pengelolaan Data dan Informasi	150,000,000	-	150,000,000
A	<i>Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi</i>	<i>150,000,000</i>	-	<i>150,000,000</i>
EBA.994	Layanan Perkantoran	12,626,995,000	648,327,000	11,978,668,000
001	Gaji dan Tunjangan	8,218,073,000	-	8,218,073,000
A	<i>Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi</i>	<i>8,218,073,000</i>	-	<i>8,218,073,000</i>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,408,922,000	648,327,000	3,760,595,000
A	<i>Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen</i>	<i>358,320,000</i>	-	<i>358,320,000</i>
B	<i>Layanan Operasional Perkantoran</i>	<i>2,177,205,000</i>	648,327,000	<i>1,468,878,000</i>
C	<i>Layanan Operasional Laboratorium</i>	<i>365,710,000</i>	-	<i>365,710,000</i>

Kode	Program/ Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen/ Sub Komponen	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran	177,674,000	-	177,674,000
E	Perawatan Gedung	389,324,000	-	389,324,000
F	Langganan Daya dan Jasa	614,029,000	-	614,029,000
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran	254,910,000	-	254,910,000
H	Perawatan Kendaraan	131,750,000	-	131,750,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	621,000,000	382,626,000	238,374,000
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	331,000,000	243,000,000	88,000,000
A	Pengadaan Pengolah Data	331,000,000	243,000,000	88,000,000
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	290,000,000	139,626,000	150,374,000
A	Pengadaan Alat Perkantoran	231,000,000	139,626,000	91,374,000
B	Pengadaan Mebelair	59,000,000	-	59,000,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	532,806,000	239,820,000	292,986,000
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	239,820,000	292,986,000
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	532,806,000	239,820,000	292,986,000
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai	172,040,000	-	172,040,000
B	In House Training	120,946,000	-	120,946,000
C	Peningkatan Potensi SDM	239,820,000	239,820,000	-
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	260,180,000	233,980,000	26,200,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	87,370,000	-
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	87,370,000	87,370,000	-
A	Penyusunan Program/ Kegiatan	87,370,000	87,370,000	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	71,110,000	-
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai	71,110,000	71,110,000	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	75,500,000	-
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	75,500,000	75,500,000	-
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)	39,088,000	39,088,000	-
B	Penatausahaan BMN	36,412,000	36,412,000	-
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	24,800,000	-	24,800,000
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	24,800,000	-	24,800,000
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	24,800,000	-	24,800,000
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
051	Penyelenggaraan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
A	Penatalaksanaan Kearsipan	1,400,000	-	1,400,000
Total		19,656,486,000	2,821,967,000	16,834,519,000

2. 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

2.2.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BSPJI Samarinda dalam rencana kerja tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis BSPJI Samarinda Tahun yang mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan BSKJI Tahun 2025– 2029, yang terangkum dalam Matriks Alur IKU BSKJI adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri

Indikator Tujuan:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Pengukuran:

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuisioner dan indeks mengacu pada PermenPANRB 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.

Cara Pengukuran:

Menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di Satker pada tahun ke-n.

2. Sasaran Kinerja Pertama:

Terwujudnya layanan jasa industri yang professional

Indikator Kinerja:

a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\% \text{ pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu sesuai SLA}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan: Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

b. Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Menghitung:

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$\text{NPS} = \% \text{ Promoters} - \% \text{ Detractors}$$

3. Sasaran Kinerja Kedua

Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri

Indikator Kinerja:

a. Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Menghitung:

Menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n dan jumlah PNBP pada tahun n-1 dibagi A dikalikan 100%.

b. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n.

c. Nilai Revenue on Asset (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Cara Menghitung:

Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%.

d. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Cara Menghitung:

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

4. Sasaran Kinerja Ketiga

Terwujudnya SDM Profesional

Indikator Kinerja:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Menghitung:

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.

5. Sasaran Kinerja Keempat

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

b. Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Menghitung capaian LKE SPBE

c. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
- Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.

6. Sasaran Kegiatan Kelima

Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja :

a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

Cara Menghitung:

Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker tahun n-1 dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker tahun n-1 dikalikan 100%.

b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada unit kearsipan merujuk pada Peraturan Arsip Nasional nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan.

7. Sasaran Kinerja Keenam

Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Indikator Kinerja:

a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Menghitung:

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian merujuk pada Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

Cara Menghitung:

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

8. Sasaran Kinerja Ketujuh

Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja:

a. Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

Cara Menghitung:

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$$

2.2.2. Indikator Kinerja berdasarkan Kegiatan

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		-	
EC.6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		-	
AEC	Kerja sama	Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis yang dihasilkan	5	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan
AEC.002	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		5	Dokumen
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		-	
A	Kerjasama dan Kemitraan		-	
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	Capaian jumlah peserta yang mengikuti Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Layanan Teknis	500	Orang
AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		500	Orang
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis		-	
A	Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Layanan Jasa Industri		-	
B	Temu Pelanggan		-	
C	Pameran		-	
D	Webinar		-	
E	Promosi dan Pemasaran Layanan		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
F	Unit Pelayanan Publik			
BAD	Pelayanan Publik kepada industri	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa	386	Industri
BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian		300	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian		-	
A	Pengujian Produk/ Proses Produksi		-	
B	Sampling		-	
056	Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/ Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium		-	
BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		29	Industri
051	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		-	
A	Kalibrasi Peralatan Uji/ Proses Produksi Industri		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi		-	
A	Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium Kalibrasi		-	
BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi		44	Industri
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		-	
A	Sertifikasi Produk		-	
052	Akreditasi/ Surveilance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi		-	
A	Pemeliharaan Kelembagaan (Akreditasi/Surveilance/Reakreditasi/Witness)		-	
B	Pengembangan Kelembagaan (Penambahan Ruang Lingkup LS Pro, Lab uji, LSSM, LSIH)		-	
BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		13	Industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
A	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		-	
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	Jumlah industri yang dibina	10	Industri, IKM, Miliar, USD
BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri		10	Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri		-	
A	Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Sertifikat TKDN IK di Balikpapan		-	
B	Konsultasi dan Fasilitasi Pendaftaran HKI		-	
C	Konsultasi dan Pendampingan Akreditasi Laboratorium SNI/IEC 17025:2017 di Kab. Berau		-	
D	Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Kecil Odah Njadjan melalui Perbaikan Peralatan Pencetakan Oven Sagon		-	
CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/layanan/lab	59	Unit

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		59	Unit
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		-	
A	Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian		-	
B	Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium		-	
WA	Program Dukungan Manajemen		-	
WA.6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri		-	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terselenggaranya layanan manajemen internal Satker	2	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
051	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
A	Pengelolaan Data dan Informasi		-	
EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
001	Gaji dan Tunjangan		-	
A	Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium, dan Vokasi		-	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		-	
A	Layanan Operasional Pimpinan dan Manajemen		-	
B	Layanan Operasional Perkantoran		-	
C	Layanan Operasional Laboratorium		-	
D	Layanan Operasional Pendukung Perkantoran		-	
E	Perawatan Gedung		-	
F	Langganan Daya dan Jasa		-	
G	Perbaikan Peralatan Perkantoran		-	
H	Perawatan Kendaraan		-	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Tersedianya layanan sarana dan prasarana internal	37	Unit, m2, Paket
EBB.951	Layanan Sarana Internal		37	Unit
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		-	
A	Pengadaan Pengolah Data		-	
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		-	
A	Pengadaan Alat Perkantoran		-	
B	Pengadaan Mebelair		-	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	52	Orang, Layanan, Rekomendasi
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		52	Orang
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		-	
A	Peningkatan Kompetensi SDM Balai		-	
B	In House Training		-	
C	Peningkatan Potensi SDM		-	

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen/ Sub Komponen	Indikator Kinerja	Output	Satuan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal	6	Dokumen, Layanan, Laporan, Laporan, Rekomendasi
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		-	
A	Penyusunan Program/ Kegiatan		-	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		-	
A	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai		-	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	Dokumen
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		-	
A	Pelaporan Keuangan Akutansi Negara (SAP)		-	
B	Penatausahaan BMN		-	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		-	
A	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		-	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		1	Dokumen
051	Penyelenggaraan Kearsipan		-	
A	Penatalaksanaan Kearsipan		-	

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan II tahun anggaran 2025, BSPJI Samarinda telah melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja maupun rencana Aksi TA. 2025. Progres realisasi fisik dari target Perjakin hingga triwulan II mencapai 56,76%. Capaian ini sesuai dengan target yang tertuang dalam rencana aksi BSPJI Samarinda tahun 2025.

Capaian kinerja BSPJI Samarinda juga mencakup capaian indikator kinerja kegiatan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Capaian kinerja keuangan telah terealisasi sebesar 47.43% menurut Aplikasi SAKTI berbasis akrual terhadap pagu efektif. Sementara berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew diperoleh capaian kinerja keuangan sebesar 44,60% berbasis akrual terhadap pagu efektif sedangkan menurut aplikasi OMSPAN adalah sebesar 35,14%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan capaian kinerja keuangan berdasarkan masing-masing sumber, hal ini disebabkan terdapat beberapa transaksi yang masih dalam proses penerbitan SP2D. Capaian kinerja keuangan belum memenuhi target yang ditetapkan oleh BSKJI untuk triwulan II yaitu 51,19%. Adapun capaian kinerja fisik menurut perhitungan realisasi fisik perjanjian kinerja diperoleh sebesar 56,76% dan telah melebihi target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu 55%.

Pada pelaksanaan kegiatan BSPJI Samarinda menerapkan optimalisasi sumber daya baik anggaran, SDM serta sarana dan prasarana yang dimaksudkan agar seluruh sumber daya yang dimiliki dapat menunjang tercapainya seluruh target tersebut. Langkah optimalisasi sumber daya diharapkan berdampak pada terciptanya efisiensi anggaran. Pada Triwulan II telah dilakukan 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 2 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Revisi DIPA kewenangan DJA dilaksanakan dalam rangka relaksasi blokir belanja sehingga total blokir menjadi sebesar Rp. 2,821,967,000 dari total pagu sebesar Rp. 19,656,486,000. Selanjutnya, revisi kewenangan Kanwil dilakukan dalam rangka pemutakhiran Halaman III DIPA. Selanjutnya, revisi DIPA kewenangan KPA maupun revisi POK dilaksanakan dalam rangka revisi administrasi. Dengan berakhirnya Triwulan II, maka secara keseluruhan BSPJI Samarinda telah melaksanakan revisi DIPA sebanyak 10 kali dalam Tahun 2025.

Tabel 7. Rencana Aksi TA. 2025

Unit Organisasi : Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																		
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV						
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan					
1	2	3		4		5	6			7	8			9	10			11	12					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	24%	1	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			48%	4	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			72%	7	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target			100%	10	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							2	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				5	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				8	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				11	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	
							3	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				6	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				9	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target				12	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TJ.2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210 Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Penyusunan jadwal audit perusahaan dan pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal serta Sertifikasi produk	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri
					2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi									
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12		
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi serta melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi d) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Pembinaan SDM Industri e) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Verifikasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk		
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	25%	1 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	50%	4 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	75%	7 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	100%	10 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi																			
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV													
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan												
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12												
							2	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		5	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		8	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		11	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							3	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		6	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		9	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan		12	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan								
							SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)		6	Nilai		24%	1		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	48%	4	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	72%	7	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	100%	10	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial
								2		Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial			5	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial			8	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		11	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial				
			3	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		6	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		9	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial		12	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial												

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen	25%	1	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	50%	4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	75%	7	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	100%	10	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
							2	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		8	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		11	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA		12) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA
		SK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	4545	Hasil Layanan	25%	1 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	50%	4 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	75%	7 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	100%	10 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		8 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		11 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
							3 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		9 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA		12 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	20%	1 a) Penyampaian Laporan b) Pengawasan BMN untuk TA. 2024 c) Penyiapan konsep laporan BMN d) Inventarisasi BMN yang akan diusulkan penghapusan	45%	4 a) Lanjutan proses pengadaan Mebelair b) Proses Lelang Barang Inventaris Kantor c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	70%	7 a) Penyampaian Lap. Wasdal Semester I b) Pengusulan PSP untuk pengadaan Semester 1 c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL d) Penyusunan Laporan BMN Semester 1 2025	100%	10 a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Lanjutan Pengadaan Mebelair dan Inventaris Kantor Lainnya

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12				
							2	a) Koordinasi dengan KPKNL terkait usulan proses penghapusan b) Hunting Penyedia pengadaan alat laboratorium & pengolah data melalui E-Catalog c) Proses Pengadaan Alat Laboratorium & Pengolah Data Reviu Laporan BMN Unaudited TA. 2024 d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		5	a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		8	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		11	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Penyelesaian To Do List Triwulan III
							3	a) Penyiapan dokumen usulan penghapusan BMN b) Pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor c) Penyiapan proses pengadaan meubelair d) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		6	a) Pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL		9	a) Reviu Laporan BMN Semester 1 oleh APIP b) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL c) Finalisasi Laporan BMN Semester 1		12	a) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL b) Pengusulan PSP untuk pengadaan belanja modal Semester 2 c) Perhitungan dan Evaluasi capaian nilai ROA d) Penyelesaian To Do List Triwulan III
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	20%	1	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU	50%	4	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU	75%	7	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	100%	10	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		5 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		8 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		11 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
							3 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		6 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU		9 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya		12 a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPN BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNBPN BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNBPN BLU
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	82,96	Indeks	25%	1 a) Membuat laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi TA. 2024 b) Identifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing Ketua Tim c) Perencanaan pelatihan pengadaan Barang/Jasa	50%	4 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	75%	7 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Penetapan nilai sementara IP ASN Semester I	100%	10 a) Evaluasi kebutuhan pelatihan dengan ketersediaan anggaran b) Revisi anggaran pengembangan kompetensi (bila diperlukan)

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi							
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
							2 a) Membuat program pelatihan tahun 2025 b) Pelaksanaan pelatihan bidang sertifikasi dan pengujian		5 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan		8 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 1		11 a) Update data pengembangan kompetensi pegawai pada Link yang dikeluarkan Biro OSDM b) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terkait pengembangan layanan
							3 a) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan I b) Revisi kegiatan pengembangan kompetensi		6 a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II		9 Pelaksanaan Pelatihan pengembangan kompetensi non teknis (In House Training)		12 Evaluasi hasil penetapan nilai IP ASN Semester 2
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen	15%	1 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	40%	4 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	80%	7 Membuat perencanaan pengembangan aplikasi SILABISA	100%	10 Melakukan pengujian pengembangan aplikasi SILABISA
							2 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		5 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		8 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		11 Melakukan Implementasi pengembangan aplikasi SILABISA
							3 Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA		6 Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA		9 Membuat rancang bangun pengembangan aplikasi SILABISA		12 Kegiatan selesai
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80	Persen	15%	1 Membuat data dukung LKE SPBE	35%	4 Membuat data dukung LKE SPBE	70%	7 Membuat data dukung LKE SPBE	100%	10 Membuat data dukung LKE SPBE
							2 Membuat data dukung LKE SPBE		5 Membuat data dukung LKE SPBE		8 Membuat data dukung LKE SPBE		11 Membuat data dukung LKE SPBE
							3 Membuat data dukung LKE SPBE		6 Membuat data dukung LKE SPBE		9 Membuat data dukung LKE SPBE		12 Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	15%	1	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	40%	4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	70%	7	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	100%	10	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							2	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		5	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM		8	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		11	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
							3	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		6	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduane) Penyusunan perubahan SPM		9	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan		12	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publikb) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang updated) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	Persen	20%	1	Menyelesaikan seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan kegiatan TA. 2024	80%	4	Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja	100%	7	Monitoring progress penyampaian tindak lanjut LHP Ke Sekretariat Inspektorat Jenderal		10	Kegiatan selesai
							2	Pengumpulan permintaan data dukung untuk keperluan Audit Kinerja Inspektorat		5	Menyelesaikan saran-saran tindaklanjut audit kinerja yang tercantum dalam LHP		8	Reviu Tindak Lanjut LHP oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal		11	Kegiatan selesai

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
						Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan		Target Antara	Rencana Kegiatan	
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
							3	Koordinasi dengan tim auditor terkait jadwal rencana audit		6	Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jebderal		9	Kegiatan selesai		12	Kegiatan selesai
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98	Nilai	20%	1	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan sarana penyimpanan arsip aktif menggunakan Filling Cabinet, sekat guide Primer, Skunder dan Tersier	50%	4	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File	80%	7	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Januari – Juni)	100%	10	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksanakan pemberkasan arsip aktif
							2	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyiapkan out indicator arsip aktif yang digunakan dalam peminjaman arsip aktif c) Menyajikan arsip aktif bagi kepentingan internal		5	a)nPengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital		8	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Menyusun daftar arsip aktif		11	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melaksankan penyimpanan arsip aktif
							3	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas		6	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif		9	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melauai penarapan srikandi c) Menginput daftar arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif		12	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Membuat daftar arsip kegiatan per 6 bulan (Juli-Desember) c) Melaksanakan Pemindahan arsip dari unit pengolah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip mewakili fungsi satker d) Membuat berita acara pemindahan arsip

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi											
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan				
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12	
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	Nilai	25%	1	a) Penyelesaian dan Reviu LAK 2024 b) Penyusunan Revisi RSB 2023-2027 c) Rapat Kerja 2025	50%	4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029	75%	7	Penyusunan Laporan PP 39 TW 2	100%	10	a) Penyusunan Laporan PP 39 TW 3 b) Penyusunan RBA Indikatif TA.2027
							2	a) Kick Off Pelaksanaan Kegiatan TA. 2025b) Penyusunan Renkin TA. 2026 c) Evaluasi SAKIP TA. 2024		5	a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026b) Penyusunan RBA 2026 definitive		8	Reviu APIP KAK RAB dan Data dukung TA. 2026		11	a) Penyusunan TRPNBP TA. 2027b) Rapat Monev TW 4
							3	a) Pengumpulan usulan KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 1 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		6	a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		9	a) Reviu DJA KAK RAB dan Data dukung TA. 2026 b) Rapat Monev TW 3 c) Pelaporan Monev BAPPENAS		12	a) Penyusunan Renja TA. 2026 b) Pelaporan Monev BAPPENAS c) Penyusunan Laporan PP 39 TW 4
		SK.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	24%	1	a) Revisi DIPA awal dan Pencantuman Saldo Awal b) Penyusunan Rencana Belanja per Kegiatan (Sub Komponen) c) Pengajuan UP d) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Januari	48%	4	a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April	72%	7	a) Pelaporan CAPUT Juni b) Revisi DIPA TW 3 Pemutakhiran RPD (maks 10 Juli) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juli d) Pengajuan GUP Juli	100%	10	a) Pelaporan CAPUT September b) Revisi DIPA TW 4 Pemutakhiran RPD (maks 10 Oktober) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Oktober d) Pengajuan GUP Oktober
							2	a) Penyusunan RPD (maks 10 Februari) b) Pelaporan CAPUT Januari c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Februari d) Pengajuan GUP Februari		5	a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei		8	a) Pelaporan CAPUT Juli b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Agustus c) Pengajuan GUP Agustus		11	a) Pelaporan CAPUT Oktober b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja November b) Pengajuan TUP Pengajuan GUP November
							3	a) Pelaporan CAPUT Februari b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Maret c) Pengajuan GUP Maret d) Monev Penyerapan Anggaran TW 1		6	a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2		9	a) Pelaporan CAPUT Agustus b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja September c) Pengajuan GUP September d) Monev Penyerapan Anggaran TW 3		12	a) Pelaporan CAPUT November b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Desember c) GUP/TUP Nihil d) Monev Penyerapan Anggaran TW 4

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Rencana Aksi													
						Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV	
						Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan			Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2	3		4		5	6		7	8		9	10		11	12			
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	20%	1	Penginputan data pengadaan pada aplikasi SIRUP	45%	4	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2024	75%	7	a) Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan II 2024	100%	10	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan III & IV 2024		
							2	Tagging proses pengadaan dan pengumuman paket pengadaan pada LPSE		5	Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium		8	Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		11	Evaluasi capaian penggunaan TKD pada pengadaan barang/ jasa Semester II TA. 2024		
							3	a) Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium b) Pengusulan Izin Import untuk alat laboratorium dan Bahan Kimia		6	Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor		9	Proses Pengadaan Barang/Jasa alat laboratorium dan alat pendukung laboratorium		12	Evaluasi penyelesaian pengadaan barang/ jasa		
						22%			49%			76%			100%				

3.3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 terdapat 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan total 17 (tujuh belas) indikator yang harus dicapai. BSPJI Samarinda melaksanakan seluruh kegiatan dengan berfokus pada seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang optimal dan mampu memberikan *outcome* bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah tertuang dalam renstra. Realisasi capaian kinerja BSPJI Samarinda berdasarkan indikator pada Perjanjian Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana aksi. Pada Triwulan II diperoleh rata-rata capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebesar 87,48%.

Pada Tujuan Kegiatan, yakni **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri**, untuk indikator pertama *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, pada Triwulan II telah diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,86 dengan mutu pelayanan 96,45 (Sangat Baik). Selanjutnya indikator kedua *“Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri”*, pada Triwulan I terdapat 182 perusahaan yang telah memanfaatkan layanan jasa industri BSPJI Samarinda.

Pada Sasaran Kegiatan pertama, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional**, untuk indikator pertama *“Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)”*, pada Triwulan II diperoleh capaian SLA sebesar 96,48% untuk seluruh layanan jasa di BSPJI Samarinda. Selanjutnya, indikator kedua *“Nilai Net Promoter Score (NPS)”*, pada Triwulan II telah dilakukan penyampaian survei NPS dan telah diperoleh nilai NPS sebesar 72,72 dari 22 orang responden yang merupakan pelanggan BSPJI Samarinda.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni **Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**, untuk indikator pertama *“Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”*, pada Triwulan II diperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp. 1.852.280.453. Selanjutnya, indikator kedua *“Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri”*, pada Triwulan II diperoleh jumlah layanan jasa yang telah digunakan oleh pelanggan BSPJI Samarinda sebanyak 2358 order. Pada indikator ketiga, *“Nilai Revenue on Asset (RoA)”*, pada Triwulan II telah dilakukan perhitungan RoA dengan hasil sebesar 4,71%. Pada indikator keempat, *“Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)”*, pada Triwulan II berdasarkan perhitungan diperoleh rasio POBO sebesar 27,67%.

Pada sasaran kegiatan ketiga, yakni **Terwujudnya SDM Profesional**, dengan indikator *“Indeks Profesionalitas ASN”*, dilaksanakan melalui pengukuran IP ASN berdasarkan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seluruh pegawai, yang pada triwulan ini telah diterima hasil penilaian IP ASN dari Biro OSDM pada Intranet sebesar 83,18.

Pada sasaran kegiatan keempat, yakni **Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik**, untuk indikator pertama *“Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI”*, pada triwulan II telah dilakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi dengan melakukan persiapan lanjutan database serta penguatan infrastruktur IT pada Layanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi yang akan dituangkan ke dalam sistem aplikasi SILABISA. Selanjutnya, indikator kedua *“Tingkat Penerapan SPBE”*, pada Triwulan II telah dilakukan serangkaian rapat konsultasi pembangunan aplikasi SPBE serta pemenuhan dokumen pendukung penilaian penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pada indikator ketiga, *“Indeks Pelayanan Publik (IPP)”*, pada Triwulan II diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,68 dan masuk dalam kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”.

Pada sasaran kegiatan kelima, **Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**, indikator pertama *“Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker”*, pada Triwulan II telah disampaikan tindak lanjut terhadap hasil temuan Audit Kinerja yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 dan saat ini sedang menunggu surat balasan dari Inspektur Jenderal Wilayah III Kementerian Perindustrian. Indikator kedua, *“Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)”* pada Triwulan II telah lakukan kegiatan pengelolaan pengadministrasian naskah dinas masuk internal maupun eksternal pada SRIKANDI, pemindahan arsip inaktif, serta pembuatan daftar berkas arsip inaktif.

Pada sasaran keenam, **Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi**, pada indikator pertama *“Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker”*, dimana pada triwulan yang lalu penilaian SAKIP telah dilaksanakan dan diperoleh bahwa nilai SAKIP BSPJI Samarinda sebesar 85,40. Pada indikator kedua, *“Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)”*, pada triwulan ini diperoleh nilai IKPA sebesar 96,69.

Pada sasaran ketujuh, **Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri dengan indikator “Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”**, pada Triwulan II telah diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 54,80%.

Tabel Realisasi Rencana Aksi Sampai Triwulan II TA. 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda dapat dilihat pada bagian lampiran. Selanjutnya, berikut pembahasan masing-masing capaian indikator kinerja pada Triwulan II:

TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Capaian Kinerja TJ

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66	3,86	105,46	48	50	B4: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B5: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target B6: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B4: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B5: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan B6: a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survei kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66
		Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	210	182	86,67	50	80	B4: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri B5: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi	B4: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan akreditasi LSSM dan persiapan dokumen LHP Utama c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk B6: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk produk	B5: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Proses audit LSSM dan persiapan dokumen LPH Utama c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga B6: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pelaksanaan witness dan pengajuan akreditasi LPH ke BPJPJ c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Tujuan 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 48% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA, pemantauan pengaduan pelanggan, serta melakukan analisis hasil survei kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66.

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025 diperoleh dari penilaian 113 responden dari jumlah total sebanyak 182 pengguna jasa. Keseluruhan responden yang melakukan survei merupakan pengguna jasa dengan layanan jasa Pengujian, sedangkan layanan jasa selain pengujian belum terdapat responden yang melakukan pengisian pada survei. Berdasarkan data survei yang diterima, penilaian indeks responden dapat dikelompokkan seperti tabel berikut:

Tabel 9. Klasifikasi Nilai Indeks

Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4	Total Responden	Jumlah Pegguna Jasa
0	3	6	104	113	182

Nilai perolehan indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah 3,86 dengan mutu pelayanan 95,76 (Sangat Baik) sesuai dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 10. Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata unsur	Nilai rata-rata (NRR) Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,91	0,43
U2	Prosedur	3,91	0,43
U3	Waktu pelayanan	3,88	0,43
U4	Biaya/Tarif	3,84	0,42
U5	Produk layanan	3,89	0,43
U6	Kompetensi Pelaksana	3,90	0,43
U7	Perilaku Pelaksana	3,93	0,43
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,90	0,43
U9	Sarana dan Prasarana	3,93	0,43
Indeks Kepuasan Masyarakat ($\sum$ NRR Tertimbang)			3,86
IKM Unit Pelayanan ($\sum$ NRR Tertimbang x 25)			95,76
Mutu Pelayanan			Sangat Baik

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2025, maka hasil yang diperoleh 3,86 dengan mutu pelayanan 96,45 (Sangat Baik), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,66.

b) Kendala

- Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Adanya keterbatasan petugas dalam memonitoring pengguna jasa apakah telah melakukan survei secara konvensional pada layanan selain jasa pengujian karena sifat pengisiannya sukarela.
- Kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survei.
- Beberapa responden memberikan penilaian survei kurang baik karena hasil uji sample pada layanan pengujian tidak sesuai harapan pengguna jasa

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan pengisian responden pada layanan kalibrasi, pelatihan, konsultasi dan sertifikasi.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah tersedianya sistem survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden.

Indikator Tujuan 2: Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI pada tahun berjalan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Selanjutnya pada Triwulan I juga dilakukan optimalisasi penggunaan database industri potensial area Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk melakukan kegiatan audiensi layanan dan peninjauan kerjasama. Selanjutnya, dilakukan

perbaikan dan update data pada booklet layanan secara berkala sesuai dengan pengembangan layanan yang telah dilakukan. Kemudian, dilakukan pembuatan sistem penawaran harga melalui aplikasi SILABISA guna meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien, serta penyusunan program – program layanan promosi untuk meningkatkan serta pelaksanaan evaluasi perbaikan layanan melalui survei kepuasan pelanggan.

Adapun jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa pada Triwulan II ada sebanyak 182 Industri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri

Jenis Layanan	Jan*	Feb*	Mar*	Apr*	Mei*	Jun*	Total Industri Triwulan II
Pengujian	47	52	39	57	62	63	160
Kalibrasi	-	1	1	-	-	4	5
Sertifikasi Produk	-	-	1	7	-	-	8
Pemeriksaan Halal	1	1	-	-	-	-	2
Pelatihan	-	-	-	-	1	1	2
Konsultansi	-	-	-	-	-	2	2
Verifikasi TKDN	-	2	-	-	-	-	2
Narasumber/Pengajar	0	1	1	-	-	-	2
Total Keseluruhan	47	56	42	64	63	70	182
% Capaian							86,67 %

** jumlah perusahaan industri tanpa memperhitungkan perulangan order*

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan layanan jasa industri pada periode Triwulan II tahun 2025 mencapai 182 perusahaan terhadap target 210 perusahaan sehingga diperoleh capaian sebesar 86,67%.

b) Kendala

Pada periode triwulan II telah mencapai target jumlah industri yang telah ditetapkan, namun pada layanan pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan layanan narasumber / pengajar pada periode triwulan II masih sangat sedikit. Kondisi ini disebabkan permintaan layanan-layanan jasa tersebut sangat tergantung dari kebutuhan dan permintaan industri (*eksternal*). Selain itu, permintaan layanan jasa konsultansi, pendampingan, pembimbingan dan verifikasi masih didominasi oleh industri kecil yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah, sementara permintaan dari industri menengah keatas masih sangat sedikit untuk menggunakan layanan jasa ini.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah Industri yang menggunakan jasa layanan. Rencana perbaikan ditriwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait.

SK 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional

Tabel 12. Capaian Kinerja SK 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	96,48	112,19	50	50	B4: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B5: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan B6: a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B4: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling B5: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling B6: Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	6	-	-	48	50	B4: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi	B4: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								layanan melalui media sosial B5: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial B6: Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS) B5: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS) B6: a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indikator Kinerja 1: Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap tercapainya target waktu penyelesaian layanan jasa teknis industri serta melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap kendala pencapaian sasaran. Adapun jenis layanan jasa industri yang dimaksud berupa layanan jasa pengujian dan kalibrasi, layanan jasa sertifikasi, layanan jasa konsultasi.

Adapun capaian pada masing-masing SLA untuk jasa layanan di BSPJI Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi SLA

No	Jenis Layanan	Capaian Mutu sesuai SLA (%)					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengujian dan Kalibrasi	96,11	94,32	100	62,37	91,60	100
2	Sertifikasi	-	100	-	100	100	100
3	Bimbingan dan Konsultasi	-	100	-	100	100	100
Rata-rata		96,11	98,11	100	87,46	97,20	100
Rata-rata s.d. TW II		96,48					

Hasil capaian mutu (target penyelesaian) layanan jasa teknis pada Triwulan II adalah sebesar 96,48%, dimana capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 86%.

b) Kendala

Adapun kendala yang perlu diantisipasi dalam pencapaian target sasaran mutu dalam layanan pengujian dan kalibrasi, antara lain:

- Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi dapat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling
- Komunikasi yang kurang efektif antar personel terkait sistem di SIL sebagai contoh mekanisme pengaturan penggantian untuk analis yang cuti dan sampling dengan waktu yang lama belum efektif hal ini dapat berpengaruh juga terhadap pencapaian sasaran mutu
- Waktu penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda belum dipisahkan dengan jelas seperti sampel air dan aneka komoditi dengan rangkaian pengujian yang memiliki tahapan yang panjang
- Modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan
- Terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji

Sementara untuk kegiatan sertifikasi, bimbingan dan konsultasi belum ditemukan kendala terkait pelaksanaannya. Dalam pencapaian target ketepatan waktu sampel di kegiatan pengujian dan kalibrasi diperlukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus terhadap pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis pengujian serta dilakukan pencegahan terhadap hal-hal yang menghambat pencapaian target penyelesaian..

c) Tindak Lanjut

Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.

Indikator Kinerja 2: Nilai Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Hingga akhir triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 48% dengan realisasi sebesar 50% Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II melakukan survey NPS pada pelanggan yang menggunakan layanan jasa industri serta melakukan analisis hasil survey kepada responden yang memberi nilai survey. Pelaksanaan survey menggunakan google form dengan link https://bit.ly/SurveyNPS_BSPJISamarinda yang di share melalui media *WhatsApp* dan kemudian akan diisi oleh masing-masing pengguna jasa.

Berdasarkan hasil survei NPS sampai dengan akhir triwulan II tahun 2025, telah diperoleh penilaian 22 (dua puluh dua) responden dari jumlah total sebanyak 182 pengguna jasa. Dari data survei yang diterima, hasil rekapitulasi respon survey NPS sampai periode Triwulan II seperti tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Survei NPS Triwulan II

No	Nilai / Score	Jumlah Responden
1	1 - 7	0
2	8	6
3	9	4
4	10	12
Total Responden		22
% Promoters (Promoters / total responden x 100)		72,72 %
% Detractors (Detractors /total responden x 100)		0 %
NPS = (% Promoters) – (% Detractors)		72,72

Berdasarkan tabel diatas berikut hasil perhitungan NPS :

Dari survei NPS diterima data 22 responden tanggapan. Dari tanggapan tersebut diperoleh nilai :

- 16 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 6 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 0 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka Nilai NPS yang diperoleh adalah:

$$\% \text{ Promoters: } (16/22) \times 100 = 72,72$$

$$\% \text{ Detractors: } (0/22) \times 100 = 0$$

$$\text{NPS} = 72,72 - 0 = 72,72$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh skor NPS periode Triwulan II adalah 72,72, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

b) Kendala

Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah responden belum maksimal sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang dilayani.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah responden yang mengikuti survei NPS masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA.

SK 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri**Tabel 15. Capaian Kinerja SK 2**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	-	-	50	50	B4: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA B5: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNBP di aplikasi SILABISA	B4: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order B5: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								B6: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian PNPB di aplikasi SILABISA	B6: a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNPB c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	4500	2358	21,88	50	50	B4: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B5: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA B6: a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang	B4: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B5: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media B6: a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	
		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	8,10	4,71	58,15	45	50	B4: a) Lanjutan proses pengadaan Meubelair b) Proses Lelang Barang Inventaris Kantor c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL B5: a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang Inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL B6: a) Pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	B4: a) Rincian kebutuhan meubelair telah ditentukan, namun pengadaan meubelair masih ditunda sambil menunggu ketersediaan anggaran b) Proses lelang BMN belum dilakukan karena masih menunggu surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Maret tahun 2025 kepada KPKNL. B5: a) Proses lelang BMN belum dilakukan karena surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal baru diterima di Bulan Mei. b) Proses pengadaan AC telah selesai dilaksanakan. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan April tahun 2025 kepada KPKNL B6: a) Pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan Gedung kantor telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan. b) RKBMN dalam proses persiapann penyusunan dan menunggu penjadwalan pengusulan RKBMN dari Biro Keuangan. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
									yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Mei tahun 2025 kepada KPKNL
		Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	27,67	66,67	50	50	B4: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU B5: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU B6: a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya	B4: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 8 April 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 April 2025 c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala B5: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 5 Mei 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 28 Mei 2025 c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala B6: a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Juni 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 Juni 2025 c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini :

1) Indikator Kinerja 1 : Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan I TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Selain itu, dilakukan pula inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama pada PT. Lamindo Intermultikon, PT. Baker Hughes Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, PT. Petro Andalan Nusantara, PT. Wilmar Nabati Indonesia, PT. Putra Bongan Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, CV. Bintang Mas Jaya Lembuswana, PT. Kaltim Parna Industri, Klinik Minta Sehat, PT. Sarana Abadi Lestari, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nunukan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, PT. Syam Surya Mandiri, PT. Mega Prima Persada, RSUD I. A. Moeis, dan RS Pratama Nawacita Datah Dave.

Tabel 16. Pendapatan PNBP berdasarkan Pembukuan Bendahara Penerimaan

No.	Layanan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total Realisasi TW II
A	424113 (Jasa Pelayanan)	430.095.500	227.361.544	361.480.850	206.640.550	264.619.000	342.142.150	1.830.703.594
1.	- Pengujian	251.049.500	179.798.100	346.045.850	171.660.550	241.919.000	331.332.950	1.521.805.950
	- Transportasi dan Akomodasi	150.000	2.557.000	15.435.000	5.080.000	-	3.214.200	26.436.200
2.	Kalibrasi		20.220.444	-	-	-	7.595.000	27.815.444
3.	Sertifikasi Produk	4.900.000		-	29.900.000	14.700.000	-	49.500.000
4.	Pemeriksaan Halal	7.996.000	4.932.000	-	-	-	-	12.928.000
5.	Pelatihan	-	-	-	-	8.000.000		8.000.000
6.	Konsultasi	166.000.000	-	-	-	-	-	166.000.000
7.	Verifikasi TKDN		15.620.000		-	-	-	15.620.000
8.	Narasumber /Pengajar	-	4.234.000	-	-	-	-	4.234.000
B	424911 (Jasa Perbankan)	3.698.280	3.481.457	3.737.779	3.520.423	3.004.737	2.498.183	19.940.859
	Jasa Giro	3.698.280	3.481.457	3.737.779	3.520.423	3.004.737	2.498.183	19.940.859
	Total Pendapatan	433.793.780	230.843.001	365.218.629	210.160.973	267.623.737	344.640.333	1.852.280.453

Pada Triwulan II, telah diperoleh PNBPN sebesar Rp. 1.852.280.453 berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan. Sementara, berdasarkan data pengesahan (Omspan) diperoleh PNBPN sebesar Rp 1.799.117.207.

Dari jumlah PNBPN (berdasarkan pembukuan bendahara penerimaan), diperoleh capaian PNBPN sebesar 23,60% dari target PNBPN sebesar Rp. 7.850.000.000,- (target meningkat 9,22% dari capaian PNBPN tahun sebelumnya).

b) Kendala

Target PNBPN pada Triwulan II belum mencapai target. Jika dilihat pada tabel pendapatan, selain layanan pengujian, layanan lainnya tidak rutin mencakup pada semua layanan jasa, misalnya pada layanan jasa Pemeriksaan Halal, Pelatihan, konsultasi, verifikasi TKDN dan Narasumber/Pengajar. Pada kelima layanan ini belum mendapatkan pendapatan pada periode Triwulan II. Sedangkan jika dilihat pada periode Bulan Maret, penerimaan PNBPN hanya mengandalkan dari Layanan Jasa Pengujian dan Transportasi dan Akomodasi.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu ditingkatkan lagi proporsi pendapatan layanan jasa lain selain jasa pengujian. Rencana perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan peningkatan promosi layanan Jasa Lainnya selain layanan jasa pengujian.

2) Indikator Kinerja 2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Jumlah hasil layanan yang dimaksud adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam satu tahun.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah pelaksanaan layanan jasa seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. Dalam rangka meningkatkan jumlah hasil layanan juga telah dilakukan analisis dan pengolahan data industri yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan industri yang ada di wilayah Kalimantan Timur seperti pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, perhotelan, dan rumah sakit.

Pada triwulan II telah dilakukan kunjungan dalam rangka peninjauan kerjasama pada Dinas Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan timur, selain itu juga dilakukan kunjungan Industri pada PT. Fairco Agro Mandiri, PT.

FAP Agro, PT. Multi Harapan utama, PT. Teladan Prima Agro, PT. Kideco Jaya Agung, serta PT. Arini.

Jumlah layanan jasa BSPJI Samarinda sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Layanan Periode Triwulan II Tahun 2025

Jenis Layanan	TW I	Apr	Mei	Jun	Total Keseluruhan
Pengujian	822	372	476	602	2272
Kalibrasi	11	-	-	35	46
Sertifikasi Produk	1	6	-	-	7
Pemeriksaan Halal	2	-	-	-	2
Pelatihan	0	-	1	23	24
Konsultasi	0	-	-	2	2
Verifikasi TKDN	2	-	-	-	2
Narasumber/Pengajar	3	-	-	-	3
Total Keseluruhan	841	378	477	662	2358
% Capaian terhadap target					51,88%

Berdasarkan data pada tabel diatas, Jumlah Layanan pada periode Triwulan I tahun 2025 mencapai 2358 order dengan capaian sebesar 51,88% terhadap target 4.545 order.

b) Kendala

- Pada periode Triwulan II, secara keseluruhan layanan telah mencapai target order, namun pada layanan pelatihan dan konsultasi belum memiliki order pada periode ini. selain itu pada layanan sertifikasi produk, pemeriksa halal, verifikasi TKDN dan layanan narasumber/pengajar juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan layanan pengujian dan kalibrasi.
- Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia pada kegiatan kunjungan dan peninjauan kerjasama karena merangkap dengan tugas dan kegiatan lainnya.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlu adanya pengembangan layanan yang secara bertahap sehingga dapat membantu meningkatkan jumlah order layanan.

3) Indikator Kinerja 3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 45% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah :

- a. Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang berasal dari pemanfaatan BMN kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disampaikan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian pendapatan yang diperoleh dari berbagai bentuk pemanfaatan BMN, seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk lainnya yang sah.
- b. Proses pengadaan Air Conditioner (AC) telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Pengadaan ini dilakukan untuk mendukung kenyamanan lingkungan kerja. Semua unit AC yang telah diterima telah dipasang dan berfungsi dengan baik. Proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemasangan, telah berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan gedung kantor telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan Juni. Kegiatan tersebut mencakup perbaikan ringan pada bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan serta pemeliharaan rutin guna menjaga kondisi fisik bangunan agar tetap layak dan mendukung kelancaran aktivitas kerja. Diharapkan pemeliharaan/perbaikan fasilitas gedung kantor dapat berfungsi lebih optimal serta memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawai dan pengguna layanan.
- d. Berdasarkan data selama Triwulan II 2025 (per 30 Juni 2025) BSPJI Samarinda telah menerima total pendapatan sebesar Rp.1.852.280.453,-. Sedangkan untuk nilai aset milik BSPJI Samarinda per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.39.330.935.523,-.

Dari kegiatan yang telah dilakukan sepanjang Triwulan II, dilakukan perhitungan *Nilai Revenue on Asset (RoA)* dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Revenue on Asset (RoA)} &= (\text{PNBP Layanan Jasa} / \text{Total Nilai Aset}) \times 100\% \\ &= (1.852.280.453 / 39.330.935.523) \times 100\% = 4,71\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai RoA pada Triwulan II sebesar 4,71% dari target 8,10% atau tercapai sebesar 58,15%.

b) Kendala

Proses pengadaan meubelair hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena terdapat kendala keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Alokasi anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan meubelair yang telah direncanakan,

sehingga kegiatan tersebut harus ditunda pelaksanaannya. Selanjutnya, proses lelang Barang Milik Negara (BMN) sampai saat ini masih belum dilaksanakan karena surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal baru saja diterbitkan. Kemudian, usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2027 masih belum diajukan karena belum adanya jadwal resmi dari Biro Keuangan mengenai pembukaan pengusulan RKBMN untuk tahun 2027.

c) Tindak Lanjut

Dalam proses lelang BMN, diharapkan dapat segera berjalan pada Triwulan III agar pemanfaatan dan pengelolaan BMN dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2027, jika telah ada arahan dan jadwal resmi yang telah ditetapkan, maka satuan kerja akan segera menyusun dan mengajukan RKBMN sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program kerja.

4) Indikator ke 4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50 % dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II meliputi:

- Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU
- Pengajuan pengesahan penerimaan dan penggunaan anggaran PNBPU BLU

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan, dengan perhitungan POBO sebagai berikut:

$$\text{POBO} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan BLU}}{\text{Belanja Operasional BLU \& RM (kecuali Belanja Modal)}}$$

$$\text{POBO} = \frac{1.852.280.453}{6.694.660.880}$$

$$\text{POBO} = 27,67\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai POBO pada Triwulan II sebesar 27,67% dari target 41,50% atau telah tercapai sebesar 66,67%.

b) Kendala

Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

c) Tindak Lanjut

Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya.

SK 3 : Terwujudnya SDM Profesional

Tabel 18. Capaian Kinerja SK 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
4	Terwujudnya SDM Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	82,96	83,18	100,27	50	70	B4: Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan B5: Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan B6: Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II	B4: a) Pelaksanaan IHT Pemahaman Titik Proses Produksi Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena dan Pengendalian Mutu Produk pada tanggal 15 April 2025, yang diikuti oleh 16 orang peserta. b) Pelaksanaan IHT Pemahaman Titik Kritis Penetapan Halal untuk Barang Gunaan dan Jasa pada tanggal 22 - 23 April 2025, yang diikuti oleh 15 orang peserta. B5: Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Pendaftaran Sertifikat Halal pada tanggal 23 Mei 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. B6: a) Pelaksanaan IHT Pengoperasian Alat Uji Isokinetik pada tanggal 10 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. b) Pelaksanaan IHT Pengujian Tangki Air Silinder Vertikal pada tanggal 17 -19 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. c) Pelaksanaan IHT Validasi Metode dan Pengujian Parameter Kualitas Tanah pada tanggal 23 - 24 Juni 2025, yang diikuti oleh 17 orang peserta. d) Pelaksanaan IHT Manajemen Risiko Sektor Publik pada tanggal 30 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. e) Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Semester I dan penyusunan laporan pelaksanaannya

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Indeks Profesionalitas ASN.

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 70%.

Pada triwulan II telah dilaksanakan pelatihan teknis melalui kegiatan in house training dan pelatihan eksternal yakni:

- In House Training Pemahaman Titik Proses Produksi Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena dan Pengendalian Mutu Produk pada tanggal 15 April 2025, yang diikuti oleh 16 orang peserta.
- In House Training Pemahaman Titik Kritis Penetapan Halal untuk Barang Gunaan dan Jasa pada tanggal 22 - 23 April 2025, yang diikuti oleh 15 orang peserta.
- Pelatihan Pendamping Pendaftaran Sertifikat Halal pada tanggal 23 Mei 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta.
- In House Training Pengoperasian Alat Uji Isokinetik pada tanggal 10 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta.
- In House Training Pengujian Tangki Air Silinder Vertikal pada tanggal 17 -19 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta.
- In House Training Validasi Metode dan Pengujian Parameter Kualitas Tanah pada tanggal 23 - 24 Juni 2025, yang diikuti oleh 17 orang peserta.
- In House Training Manajemen Risiko Sektor Publik pada tanggal 30 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta.

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian nilai IP ASN pada triwulan II berjalan dengan baik, dimana sampai akhir triwulan II realisasi dari target antara telah tercapai. Adapun sampai Triwulan II telah dilaksanakan pelatihan internal (in house training) di BSPJI Samarinda sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.

Pada triwulan II ini, Biro OSDM menyampaikan nilai IP ASN BSPJI Samarinda per tanggal 16 Juni 2025 pada Intranet dengan nilai:

- Kualifikasi : 22,74
- Kompetensi : 30,64
- Kinerja : 25,19
- Disiplin : 5,00
- Total : **83,18**

Berdasarkan nilai IP ASN tersebut, BSPJI Samarinda telah memenuhi target Perjanjian Kinerja sebesar 82,54. Nilai tersebut akan kembali diupdate mengingat pada Triwulan II ini telah dilakukan pelaporan di Intranew terkait kegiatan pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh para pegawai BSPJI Samarinda.

b) Kendala

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka pencapaian IP ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan anggaran yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

c) Tindak Lanjut

Dalam menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai. Selanjutnya, terkait dengan progres nilai IP ASN yang akan disampaikan Biro OSDM, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kepegawaian OSDM terkait kesesuaian antara data pengembangan kompetensi yang diterima OSDM dengan data yang dilaporkan Tim Kepegawaian BSPJI Samarinda pada Intranew sebelumnya.

SK 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 19. Capaian Kinerja SK 4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	25,00	125	40	40	B4: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA B5:	B4: Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA B6: Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B5: Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi B6: Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi
		Tingkat Penerapan SPBE	80,00			35	35	B4: Membuat data dukung LKE SPBE B5: Membuat data dukung LKE SPBE B6: Membuat data dukung LKE SPBE	B4: a) Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE b) Nota Dinas Penyampaian Notulensi Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE tanggal 18 Maret 2025 c) Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Aplikasi SILABISA B5: a) Penyampaian Notulensi Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE tanggal 22 April 2025 b) Merevisi Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Aplikasi SILABISA B6: Mengikuti rapat Konsultasi Aplikasi SPBE
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	4,68	103,77	40	50	B4: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B5: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment	B4: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B5: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
								prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B6: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan B6: a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) **Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI**

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 40% dengan realisasi 40%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi dengan melakukan persiapan lanjutan database serta penguatan infrastruktur IT Layanan Jasa Pengujian dan Kalibrasi yang akan dituangkan ke dalam sistem aplikasi SILABISA.

Pada Periode Triwulan I Tahun 2025, BSPJI Samarinda memiliki 8 (delapan) Layanan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Layanan Jasa BSPJI Samarinda

No	Jenis Layanan	Data Terintegrasi Sistem Informasi BSKJI	Ket.
1.	Pengujian	v	Dalam proses integrasi data
2.	Kalibrasi	v	Dalam proses integrasi data
3.	Sertifikasi Produk	x	
4.	Pemeriksaan Halal	x	
5.	Pelatihan	x	
6.	Konsultasi	x	
7.	Verifikasi TKDN	x	
8.	Narasumber /Pengajar	x	
% Capaian		= (2/8) x 100% = 25 %	

Sampai akhri Triwulan II, sudah terdapat 2(dua) layanan yang sedang dalam proses integrasi data dengan sistem informasi BSKJI.

b) Kendala

- Integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem.
- Dibutuhkan adanya penyesuaian sumber daya tim pengembang dalam hal teknis laboratorium, khususnya kebutuhan teknis laboratorium dengan kemampuan teknis pemrograman.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukan sinkronisasi data pada aplikasi SILABISA yang akan dilakukan integrasi dengan sistem Informasi BSKJI.

2) Tingkat Penerapan SPBE

Penerapan (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 35% dengan realisasi 35%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah melakukan rapat konsultasi pembangunan aplikasi SPBE. Undangan rapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung untuk LKE SPBE Indikator 9 bagian Tata Kelola SPBE. Dalam pembuatan dokumen analisis kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA, data tersebut digunakan sebagai bahan untuk Rapat Konsultasi Aplikasi SPBE tanggal 22 April 2025. Dokumen dibuat sesuai contoh dokumen siklus pembangunan aplikasi pada kebijakan SPBE Kemenperin. Seluruh dokumen pendukung selanjutnya di-*Upload* ke aplikasi: <https://lemon.kemenperin.go.id/> dan di-*backup* ke Google Drive BSPJI Samarinda melalui link :

<https://drive.google.com/drive/folders/1GbH9U1e4hGq-EZe2j2wteRzASWcQtL26?usp=sharing>

b) Kendala

Pemenuhan data dukung LKE SPBE selain memerlukan proses konsultasi dengan Pusdatin dan Biro Perencanaan, hal ini merupakan tahapan yang baru bagi penanggung jawab SPBE di lingkungan BSPJI Samarinda. Pada triwulan II tim kerja Pengembangan Jasa Industri sebagai penanggung jawab indikator SPBE masih terkendala terkait kurangnya pemahaman tentang 38 item LKE SPBE dan serta tata cara pemenuhannya.

c) Tindak Lanjut

Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM untuk mengumpulkan data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 40 % dengan realisasi 50%

Hasil perhitungan indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan II tahun 2025 diperoleh dari penilaian indikator berdasarkan pedoman Permenpan No.5 tahun 2023 , sebagai berikut:

Tabel 21. Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,33	24%	1,04
2	Profesionalisme SDM	4,60	25%	1,15
3	Sarana dan Prasarana	5,00	18%	0,90
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	4,50	12%	0,54
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,68

Berdasarkan hasil penilaian pada Triwulan I, nilai Indeks Pelayanan Publik yang telah dicapai adalah 4,68. Nilai ini telah memenuhi kriteria kategori “A” yang bermakna “Pelayanan Prima”. Nilai tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 4,51 dengan capaian sebesar 103,77%.

b) Kendala

Adanya keterbatasan sumber daya termasuk kompetensi personel dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pelayanan publik.

SK 5 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 22. Capaian Kinerja SK 5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00			80	100	B4: Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja B5: Menyelesaikan saran-saran tindaklanjut audit kinerja yang tercantum dalam LHP B6: Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jenderal	B4: a) Pada tanggal 10 April telah disampaikan matrik tindak lanjut audit kinerja TA. 2024 beserta dokumen pendukung melalui surat kepada Inspektur Jenderal Wilayah III B5: Menunggu Surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Inspektur Jenderal Wilayah III B6: Menunggu Surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Inspektur Jenderal Wilayah III
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	94,98			50	60	B4: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File B5: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital B6: a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah	B4: a) Menerima Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan berdasarkan fungsi satker b) Membuat berita acara pemidahan arsip inaktif berdasarkan fungsi satker c) Menginput daftar arsip inaktif yang dipindahkan berdasarkan fungsi satker B5: a) Melakukan penataan arsip inaktif berdasarkan asal usul dan asas aturan asli berdasarkan fungsi satker b) Melakukan pengaturan fisik arsip inaktif B6: a) Menginput daftar berkas arsip inaktif berdasarkan klafikasi mewakili seluruh fungsi satker c) Menginput daftar isi berkas arsip inaktif

								dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melalui penerapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif	bedasarkan klafikasi mewakili seluruh fungsi satker
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 80% dengan realisasi 100%.

Pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Auditor Inspektorat III untuk kegiatan TA. 2024 dilakukan mulai tanggal 16 Januari s.d 31 Januari 2025. Pada awal Triwulan II melalui Nota Dinas Nomor 357/BSPJI-Samarinda/PW/IV/2025 tanggal 10 April 2025, telah disampaikan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja BSPJI Samarinda TA. 2024.

Hingga sampai Triwulan II, belum diterima surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit yang telah disampaikan. Selanjutnya, setelah surat tanggapan atas tindak lanjut hasil audit diterima, akan dilakukan perhitungan terhadap capaian indikator ini.

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pemenuhan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.

c) Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan tim APIP terkait surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit yang telah disampaikan. Selanjutnya, terkait pelaksanaan kinerja tahun 2025, tetap dilakukan koordinasi dengan tim APIP secara berkelanjutan apabila dirasakan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan di keuangan.

2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) pada masing-masing Satuan Kerja.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan berdasarkan fungsi satker

Tabel 23. Pemindahan Arsip Inaktif

No	Kegiatan	Kode	Uraian Informasi Berkas	Retensi		Hasil Akhir
				Aktif	Inaktif	
1.	Pemindahan Arsip Inaktif TU dan Berita Acara Pindah	KU.03.01	Arsip Keuangan Tahun 2022	2 thn	9 thn	Dinilai Kembali
2.	Pemindahan Arsip Inaktif OPTIPK dan Berita Acara Pindah	IND.13	Arsip OPTIPK Tahun 2023	1 thn	4 thn	Permanen
3.	Pemindahan Arsip Inaktif SS dan Berita Acara Pindah	MS.05	Arsip SS Tahun 2019	5 thn	2 thn	Permanen
4.	Pemindahan Arsip Inaktif PJI dan Berita Acara Pindah	MS.08	Arsip PJI Tahun 2023	1 thn	2 thn	Musnah

Tabel 24. Daftar Berkas Pemindahan Arsip Inaktif

No	Kegiatan	Kode	Kurun Waktu	Jumlah	Klasifikasi Keamanan Akses Arsip	Retensi		Hasil Akhir
						Aktif	Inaktif	
1.	Pelaksanaan anggaran dokumen realisasi pengeluaran tahun 2022	KU.03.01	Jan-Des 2022	1 Folder	Biasa Eselon IV	2 thn	9 thn	Musnah
2.	Terkait Teknologi Industri masalah kegiatan Pinoti, Dapati dan Audit Halal 2023	IND.13	Jan-Nov 2023	1 Folder	Biasa	1 thn	4 thn	Permanen
3.	Survailen dalam rangka Sertifikasi Produk Tanda SNI	MS.05	Jan-Nov 2019	1 Folder	Eselon IV	5 thn	2 thn	Permanen
4.	Laporan hasil uji BSPJI Samarinda Tahun 2023	MS.08	Jan-Des 2023	1 Folder	Biasa	1 thn	2 thn	Musnah

2. Menata arsip inaktif dan pengaturan fisik arsip inaktif
3. Membuat Daftar Arsip Inaktif Berdasarkan Fungsi Satker

Tabel 25. Daftar Berkas Arsip Inaktif

No	Unit Pengolah	Kegiatan	Kode	Kurun Waktu	Jumlah	Klasifikasi Keamanan Akses Arsip	Lokasi
1.	Unit Pengolah TU	Pelaksanaan anggaran dokumen realisasi pengeluaran tahun 2022	KU.03.01	Jan-Des 2022	1 Folder	Biasa Eselon IV	Recod Center Rak 10
2.	Unit Pengolah OPTIPK	Terkait Teknologi Industri masalah kegiatan Pinoti, Dapati dan Audit Halal 2023	IND. 13	Jan-Nov 2023	1 Folder	Biasa Eselon IV	Recod Center Rak 12
3.	Unit Pengolah SS	Survailen dalam rangka Sertifikasi Produk Tanda SNI	MS.05.	Jan-Nov 2019	1 Folder	Biasa Eselon IV	Recod Center Rak 12
4.	Unit Pengolah PJI	Laporan hasil uji BSPJI Samarinda Tahun 2023	MS.08	Jan-Des 2023	1 Folder	Biasa Eselon IV	Recod Center Rak 24

b) Kendala

Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

c) Tindak Lanjut

Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya.

SK 6 : Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi

Tabel 26. Capaian Kinerja SK 6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,45	85,40	106,09	50	80	B4: a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029 B5: a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Penyusunan RBA 2026 definitive B6: a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS	B4: a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Konsep Renstra 2025-2029 B5: a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026 B6: a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2.
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	96,69	102,67	48	50	B4: a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April B5: a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei B6: a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2	B4: a) Pelaporan Caput Maret 2025 dilakukan pada tanggal 11 April 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 15 April 2025 c) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan pada Minggu ke IV pada tanggal 29 April 2025 d) Tidak Ada Pengajuan GUP di bulan April, dikarenakan UP telah dinihilkan pada tanggal 6 Maret 2025. B5: a) Pelaporan Caput April 2025 dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 b) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan pada Minggu ke IV pada tanggal 28 Mei 2025 B6: a) Pelaporan Caput ke KPPN Bulan Mei 2025 dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025 b) Pengesahan dilakukan tanggal 26 Juni 2025 c) Pelaksanaan Rapat Monev TW II tanggal 10 Juni 2025

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 50% dengan realisasi 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah:

- Penyusunan Laporan PP39 TW 1
- Penyusunan Konsep Renstra 2025-2029
- Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026
- Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026
- Rapat Monev TW 2

Untuk penyusunan RBA Defenitif tahun 2026 belum dilaksanakan karena belum adanya penetapan pagu indikatif. Sedangkan pelaporan monev BAPPENAS belum dilakukan karena akses pelaporan belum dibuka oleh BAPPENAS, sehingga pelaporan Triwulan II akan dilakukan di bulan Juli.

Pada triwulan II telah diterima LHE SAKIP BSPJI Samarinda. Berdasarkan dokumen tersebut, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda TA 2024 telah berjalan dengan baik dan secara keseluruhan mendapatkan nilai 85,40 atau kategori A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di unit kerja BSPJI Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja : 25,50
2. Pengukuran Kinerja : 27,60
3. Pelaporan Kinerja : 12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

Dalam rangka perbaikan akuntabilitas kinerja, kepada BSPJI Samarinda direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada komponen Perencanaan Kinerja:

- a. Agar dilakukan revidi atas kesesuaian dokumen perencanaan kinerja serta SOP atau pedoman teknisnya, baik terkait dasar hukum, alur aktivitas, maupun nomenklatur sesuai dengan update peraturan yang berlaku serta mendokumentasikan adanya pelaksanaan revidi tersebut secara memadai;
- b. Untuk penetapan indikator dan target kinerja di periode renstra berikutnya 2025-2029 perlu dilengkapi dengan analisis berdasarkan basis data yang memadai, serta perlu dijelaskan kendala yang dihadapi dalam mencapai target dimaksud, khususnya untuk indikator yang sama dibandingkan periode tahun sebelumnya dengan target yang tidak tercapai ataupun yang realisasinya menurun/rendah;
- c. Pemantauan rencana aksi yang telah dilaksanakan secara rutin setiap triwulan agar dapat ditingkatkan menjadi pemantauan bulanan dan tetap didokumentasikan secara memadai;

2. Pada komponen Pengukuran Kinerja:

- a. Agar dilakukan revidi dan pemanfaatan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku serta mendokumentasikan hasil revidi tersebut. Perlu diperhatikan juga kesesuaian alur pengumpulan data pada SOP dengan pelaksanaan pengumpulan data yang sudah menggunakan sistem/aplikasi;
- b. Untuk sistem/aplikasi/teknologi informasi pengukuran kinerja yang sedang dikembangkan agar dapat dioptimalisasi dan dilengkapi roadmap pengembangan atau rencana penggunaannya dalam memantau progres capaian seluruh indikator kinerja;
- c. Pelaksanaan rapat evaluasi kinerja berkala yang membahas rekomendasi atas perbaikan kinerja serta rencana penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas maupun anggaran dalam mencapai target kinerja agar dapat ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya dan tetap didokumentasikan dengan memadai;
- d. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kriteria dan mekanisme penerapan SK *reward* dan *punishment* atas kinerja, dan dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.

3. Pada komponen Pelaporan Kinerja:

- a. Penyampaian pelaporan kinerja agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan menyampaikan informasi tambahan terkait dengan kondisi nasional serta upaya/strategi kinerja yang dilakukan balai untuk mengatasi kondisi tersebut per sasaran/indikator yang hendak dicapai;

- b. Terkait penerapan budaya kinerja agar dapat terus
 - c. dikembangkan dengan meningkatkan dukungan kompetensi sumber daya balai, pemanfaatan pendekatan teknologi terkini untuk meningkatkan citra layanan balai serta penetapan kebijakan dari pimpinan untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang diinternalisasi kepada seluruh pegawai.
4. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dipertahankan dan ditingkatkan pada periode selanjutnya. BSPJI Samarinda agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, khususnya hasil evaluasi dan analisis indikator kinerja yang tidak memenuhi target di tahun 2024, untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja 2025 – 2029 serta menjaga pencapaian efektifitas dan efisiensi kinerja.

Sebagai salah satu upaya persiapan penilaian SAKIP di tahun 2026, dilakukan *self asesment* penilaian SAKIP sebagaimana terlampir. Berdasarkan data tersebut di atas dan perbandingan realisasi dengan target maka telah target indikator terwujudnya akuntabilitas organisasi pada triwulan II telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal.

c) Tindak Lanjut

Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Jenderal pada Triwulan III dan IV.

2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 48% dengan realisasi 50%.

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II meliputi pelaksanaan revisi DIPA Triwulan II, pengesahan penerimaan dan belanja, penyusunan RPD, pelaporan CAPUT , pengajuan GUP, dan Monev Penyerapan Anggaran Triwulan II. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh Nilai IKPA pada Triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Rekapitulasi IKPA Triwulan II

Bulan	Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
April	Nilai	100,00	89,91	79,46	100,00	100,00	0,00	100,00	68,49	70%	0,00	97,84
	Nilai Akhir	10,00	13,49	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Mei	Nilai	100,00	86,62	87,41	100,00	100,00	0,00	100,00	67,99	70%	0,00	97,13
	Nilai Akhir	10,00	12,99	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				
Juni	Nilai	100,00	84,56	82,80	100,00	100,00	0,00	100,00	67,68	70%	0,00	96,69
	Nilai Akhir	10,00	12,68	0,00	10,00	10,00	0,00	25,00				

Dari tabel diatas, diperoleh capaian nilai IKPA Triwulan I sebesar 96,69 dari target sebesar 94,18.

b) Kendala

Pada Triwulan II, pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat akibat menunggu proses revisi DIPA terkait relaksasi blokir belanja. Kondisi ini juga mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sepanjang triwulan ini sehingga berdampak pada pencapaian aspek “Deviasi Hal. III DIPA” dan “Penyerapan Anggaran”.

c) Tindak Lanjut

Pada Triwulan selanjutnya, perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai “Deviasi Hal. III DIPA” yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek “Penyerapan Anggaran” juga perlu diperhatikan agar dapat lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNPB setiap periodenya.

SK 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Tabel 28.Capaian Kinerja SK 7

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan II			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80,00	54,80	68,50	45	50	B4: Penyalpaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2024 B5: Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium B6: Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor	B4: Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa B5: Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I sebesar Rp 147.160.000 yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa B6: Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I sebesar Rp.196.160.000 yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa

Pada sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang akan dicapai adalah :

Peningkatan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

a) Hasil yang telah dicapai dan Analisis capaian Kinerja

Pada triwulan II TA. 2025 target fisik dari indikator ini 45% dengan realisasi 50%

Kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan II adalah Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Jasa Lainnya.

Persentase penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan akun belanja berikut:

1. Kode Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
2. Kode Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
3. Kode Akun 522191 Belanja Jasa Lainnya

Dari akun tersebut sampai triwulan II telah terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi P3DN Akun Terpilih

No	Akun	Pagu	Realisasi P3DN (Rp)	Impor (Rp)	Total Realisasi	% RP3DN
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7 = (4/3x100%)
1	521811	40.790.000	-	-	-	0,00%
2	521111	195.000.000	74.000.000	-	74.000.000	37,95%
3	522191	122.160.000	122.160.000	-	122.160.000	100,00%
	Total	357.950.000	196.160.000	-	196.160.000	54,80%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh capaian Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sampai Triwulan I sebesar 54,80%.

b) Kendala

Masih minimnya realisasi persentase penggunaan produk dalam negeri, yang disebabkan perhitungan persentase hanya diambil berdasarkan 3 akun dari 15 akun terpilih yang bersumber dari Rupiah Murni.

c) Tindak Lanjut

Melakukan monitoring secara berkala setiap bulannya terhadap realisasi pengadaan barang/jasa.

3.3.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Monitoring Rincian Output Bulanan

Kegiatan pada Triwulan II TA 2025 terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan I Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu. s/d Juni	TVRO	RVRO	Prog.	TW 1		April		Mei		Juni	
							RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.
AEC Kerja Sama														
Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899	126,754	73.98%	5	4	45.0%	4	21%	0	8%	0	8%	0	8%
AEF Sosialisasi dan Diseminasi														
Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133	251,340	29.04%	500	272	48.0%	145	24%	40	8%	45	8%	42	8%
BAD Pelayanan Publik kepada Industri														
Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360	1,518,360	37.99%	300	237	46.8%	126	20.5%	29	9%	45	8.5%	37	8.8%
Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664	168,664	9.19%	29	5	44.5%	1	20%	0	9%	1	8.5%	3	7%
Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955	392,393	23.46%	44	8	40.0%	3	15%	1	5%	2	10%	2	10%
Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472	184,472	19.58%	13	5	31.0%	2	6%	0	1%	1	12%	2	12%
BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri														
Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522	320,522	15.86%	10	9	24.1%	1	5%	1	2%	1	8.5%	6	8.6%
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan														
Peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan	2,007,500	1,185,786	9.88%	59	18	52.0%	0	9%	0	0%	3	33%	15	10%
Total EC	5.465.505	4.148.291	25.44%											

1) Hasil yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. AEC. Kerja sama

Pada Triwulan II, realisasi kegiatan kerjasama dilaksanakan melalui perjalanan dinas dalam rangka peninjauan kerja sama dengan industri ataupun perusahaan yang akan melakukan kerja sama dengan BSPJI Samarinda.

b. AEF. Sosialisasi dan Diseminasi

Pada KRO ini terdiri dari sub komponen Temu Pelanggan, Pameran, Webinar, Promosi dan Pemasaran Layanan, serta Unit Pelayanan Publik. Dalam rangka efisiensi belanja, pagu belanja dalam KRO ini sebagian besar diblokir dan menyisakan pagu hanya untuk mendukung kegiatan Promosi dan Pemasaran Layanan serta Unit Pelayanan Publik. Pada Triwulan II, realisasi kegiatan dilaksanakan melalui belanja barang yang berupa pencetakan *bookled* dan pembuatan *souvenir* yang diperlukan dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran layanan ke industri/perusahaan yang berpotensi menjadi pengguna jasa layanan BSPJI Samarinda. Selain itu, juga terdapat realisasi terhadap kebutuhan terkait *Sosial Media Management*.

c. BAD. Pelayanan Publik kepada industri

Pada KRO ini terdiri dari Rincian Output yang mendukung pelaksanaan layanan jasa teknis yakni Layanan Pengujian, Layanan Kalibrasi, Layanan Sertifikasi, serta Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri. Adapun realisasi pada KRO ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan-layanan jasa serta diperoleh melalui pelaksanaan uji profisiensi serta pengembangan kelembagaan sepanjang triwulan ini.

d. BDI. Fasilitasi dan Pembinaan Industri

Pada Triwulan II, realisasi kegiatan pada KRO ini dilaksanakan melalui pelaksanaan layanan Konsultasi dan Pembinaan Industri.

e. CAH. Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan selama triwulan ini sudah ada realisasi meskipun jumlahnya sangat kecil.

2) Kendala

Pada triwulan ini, adapun target yang ditetapkan oleh BSKJI adalah realisasi keuangan sebesar 51,19% dan capaian realisasi keuangan hanya sebesar 25,44%%. Berdasarkan capaian BSPJI Samarinda di triwulan II ini, hanya KRO Kerja sama yang memenuhi target realisasi keuangan, sementara KRO lainnya belum memenuhi target. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini adalah selain karena adanya efisiensi belanja pemerintah, kondisi lambatnya progres penerimaan PNPB juga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama triwulan II. Kondisi ini paling berdampak pada pengadaan alat laboratorium yang sampai akhir triwulan ini sangat kecil realisasinya, sementara kebutuhan akan alat ini cukup mendesak mengingat adanya pengembangan ruang lingkup serta kebutuhan akan peningkatan pada layanan pengujian yang merupakan layanan dengan proporsi jumlah penerimaan terbesar diantara layanan-layanan yang ada di BSPJI Samarinda.

3) Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti kondisi efisiensi belanja, BSPJI Samarinda telah menyusun skala prioritas kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya, sehingga kegiatan yang paling krusial seperti layanan jasa tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Dalam menanggapi kondisi penerimaan PNBP yang belum sesuai dengan target, BSPJI Samarinda sebagai satuan kerja BLU, telah menggunakan Saldo BLU untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sepanjang triwulan ini. Sepanjang Triwulan II tetap diupayakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak diblokir sehingga pencapaian realisasi fisik tetap berjalan sambil menunggu proses penerimaan PNBP.

b. Kegiatan II Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri

RO	Pagu	Pagu Efektif	% Real. Keu. s/d Juni	TVRO	RVRO	Prog.	TW 1		April		Mei		Juni	
							RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.	RVRO	Prog.
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal														
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000	150,000	0.00%	1	0	50.0%	0	19.5%	0	9%	0	13.3%	0	8.2%
Layanan Perkantoran	12,626,995	11,978,668	55.98%	1	0	50.0%	0	25.5%	0	8%	0	8.5%	0	8%
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
Layanan Sarana Internal	621,000	238,000	56.02%	37	12	57.0%	0	18%	4	13%	4	13%	4	13%
EBC Layanan Manajemen SDM Internal														
Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806	292,986	28.61%	52	44	50.0%	24	20%	10	10%	5	10%	5	10%
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal														
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370	-	0.00%	1	0	48.0%	0	20%	0	8%	0	12%	0	8%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,11	-	0.00%	1	0	48.0%	0	20%	0	8%	0	12%	0	8%
Layanan Manajemen Keuangan	75,500	-	0.00%	2	1	48.0%	1	20%	0	8%	0	10%	0	10%
Layanan Reformasi Kinerja	24,800	24,800	25.00%	1	0	39.0%	0	20%	0	5%	0	7%	0	7%
Layanan Penyelenggara -an Kearsipan	1,400	1,400	0.00%	1	0	50.0%	0	20%	0	9%	0	12%	0	9%
Total WA	14,190,981	12,686,228	54.62%											

1) Hasil yang dicapai dan Analisis capaian kinerja

Pada kegiatan ini terdapat terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO ini terdiri dari RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta RO Layanan Perkantoran. Pada Triwulan II, pada RO Layanan Hubungan Masyarakat masih belum menunjukkan adanya realisasi. Sementara pada RO Layanan Perkantoran telah menunjukkan realisasi yang baik. Adapun Layanan Perkantoran meliputi pelaksanaan pembayaran gaji serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, yang sepanjang Triwulan II dapat diupayakan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal rutin sehingga tidak mengganggu operasional sehari-hari.

b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal selama triwulan ini sudah menunjukkan adanya realisasi, meskipun pada KRO ini jumlah anggaran yang diblokir cukup besar. Realisasi dari KRO ini meliputi pengadaan alat pengolah data seperti *Personal Computer* serta peralatan perkantoran dan mebelair.

c. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi Layanan Manajemen SDM Internal diperoleh melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai dan In House Training yang dilaksanakan sepanjang triwulan ini. Adapun Kegiatan Peningkatan Potensi SDM tidak dapat dilaksanakan karena seluruh pagu belanja diblokir.

d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Adapun RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan seluruh pagu belanjanya diblokir. Selanjutnya, untuk RO Layanan Reformasi Kinerja, pada triwulan II sudah menunjukkan adanya realisasi sementara pada Layanan Penyelenggaraan Kearsipan belum menunjukkan adanya realisasi.

2) Kendala

Pada triwulan ini, realisasi keuangan dari Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri mencapai 54,62% dan capaian ini telah memenuhi target keuangan dari BSPJI sebesar 51,19%. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta Layanan Pendidikan dan Pelatihan belum menunjukkan capaian realisasi keuangan yang sesuai dengan target BSKJI. Sementara pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal secara umum tidak

dapat terealisasi akibat hampir seluruh anggaran diblokir. Kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini secara garis besar sama seperti pada kegiatan sebelumnya, yakni terkait adanya efisiensi belanja serta lambatnya progres penerimaan PNBP. Namun, dikarenakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan rutin yang memang harus direalisasikan seperti pembayaran gaji dan honor, pembayaran langganan daya dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan operasional balai, maka realisasi keuangan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri lebih baik daripada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. Ketercapaian realisasi keuangan ini juga didukung karena adanya relaksasi anggaran pada belanja operasional sehingga beberapa kebutuhan belanja dapat dipenuhi pada triwulan ini.

3) Rekomendasi

Rencana perbaikan di periode selanjutnya adalah mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang sempat tertunda di triwulan II serta melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan per triwulannya. Selanjutnya juga diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk mendorong capaian triwulan berikutnya.

3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Hambatan dan kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* terdapat kendala dimana pelaksanaan survei pada beberapa layanan jasa masih menggunakan metode konvensional sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa.
- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*, *Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, dan *Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* ditemukan kendala dimana terdapat beberapa layanan seperti pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan layanan narasumber/pengajar yang permintaannya masih sangat sedikit. Selain itu, pada layanan jasa konsultasi, pendampingan, pembimbingan dan verifikasi masih didominasi oleh industri kecil yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah
- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* ditemukan beberapa kendala pada layanan pengujian dan kalibrasi seperti keterbatasan jumlah peralatan *sampling* dan laboratorium, serta adanya perbedaan tahapan pengujian berdasarkan karakteristik sampel.

- Pada indikator *Nilai Revenue on Asset (RoA)* dan *Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)* kendala yang terjadi lebih kepada lambatnya progres penerimaan PNBPN serta capaian serapan anggaran yang merupakan komponen yang diperlukan untuk menghitung nilai dari RoA dan POBO.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* kendala yang dihadapi adalah ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* dan *Tingkat Penerapan SPBE* kendala yang terjadi lebih kepada kurangnya pemahaman sumber daya tim teknis akan proses integrasi data yang cukup kompleks dan penyiapan dokumen data dukung penerapan SPBE.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan dan Kendala pada Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan II 2025 secara garis besar terkait dengan penerimaan PNBPN yang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Sepanjang triwulan II telah dilakukan layanan jasa seperti *sampling*, namun untuk pembayaran tidak langsung dilakukan sehingga penerimaan PNBPN menjadi piutang yang tidak dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, proses pengembangan layanan dan penambahan ruang lingkup juga membutuhkan proses yang lebih lama sehingga layanan baru yang diharapkan dapat mendorong penerimaan PNBPN, tidak dapat memberikan kontribusi sampai dengan triwulan ini.

3.3. Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Langkah dan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Perjanjian Kinerja diantaranya adalah:

- Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan *Nilai Net Promoter Score (NPS)* diupayakan untuk pengembangan survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden.
- Pada indikator *Jumlah Perusahaan Industri yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri*, *Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*, dan *Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri* akan dilakukan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholder* terkait.

- Pada indikator *Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)* diperlukan perencanaan dalam proses pengujian, pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian, perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar.
- Pada indikator *Nilai Revenue on Asset (RoA)* dan *Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)* akan dilakukan upaya percepatan penerimaan PNPB melalui penagihan piutang serta penentuan skala prioritas kegiatan yang akan direalisasikan.
- Pada indikator *Indeks Profesionalitas ASN* untuk menindaklanjuti kondisi keterbatasan anggaran pada pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, maka setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis.
- Pada indikator *Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI* dan *Tingkat Penerapan SPBE* akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam proses integrasi sistem serta pengumpulan data dukung dalam rangka penerapan SPBE.

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah mengupayakan perencanaan yang matang serta strategis di awal triwulan serta melakukan monitoring yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja baik fisik maupun keuangan dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan pada setiap triwulan. Selanjutnya, terkait dengan penerimaan PNPB yang belum sesuai dengan target, pada triwulan selanjutnya akan tetap dilakukan kegiatan promosi melalui *direct marketing* ke perusahaan-perusahaan serta mengikuti lelang/tender pengujian lingkungan. Selain itu, akan dirumuskan strategi penawaran harga berupa diskon 15-20% untuk menarik pelanggan. Kemudian, akan dilakukan penugasan kepada personel khusus agar fokus untuk melakukan penagihan piutang ke perusahaan yang telah dilayani.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Relisasi Kegiatan

Capaian Kinerja triwulan II menunjukkan progres realisasi fisik dari pemenuhan target Perjakin mencapai 56,76%. Selain itu, persentase realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI berbasis akrual terhadap pagu efektif sebesar 47,43%, sementara realisasi keuangan berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Intranew berbasis akrual terhadap pagu efektif sebesar 44,60%, sementara persentase realisasi keuangan berdasarkan Ompan terhadap pagu efektif sebesar 35,14%. Adapun capaian realisasi fisik tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 55,00%, sementara untuk capaian realisasi keuangan belum sesuai dengan target yang ditetapkan BSKJI yakni sebesar 51,19%.

Selama periode Triwulan II ini, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui efisiensi anggaran, juga telah dilakukan telah dilakukan 1 kali revisi DIPA kewenangan DJA, 1 kali revisi DIPA kewenangan Kanwil, dan 2 kali revisi DIPA kewenangan KPA. Selanjutnya, sampai akhir triwulan ini dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ada, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah mendapatkan hasil capaian dengan rata-rata capaian sebesar 87,48%, yakni:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
3. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
4. Jumlah hasil layanan jasa industri
5. Nilai Revenue on Asset (RoA)
6. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
7. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
8. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
9. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
10. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktifitas Industri

Pelaksanaan Kinerja per Kegiatan pada triwulan ini, masih terdapat beberapa KRO belum mencapai target realisasi fisik maupun keuangan yang ditetapkan oleh BSKJI. Pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan masih mencapai nilai 25,44% dan pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri telah melebihi target yakni sebesar 54,62% (Aplikasi SAKTI berbasis Akrual terhadap Pagu Efektif).

4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Adapun kendala utama yang menghambat pelaksanaan kinerja keuangan maupun fisik sampai triwulan ini adalah belum tercapainya target penerimaan PNBPN, dimana capaian penerimaan PNBPN masih sebesar Rp. 1,852,280,453 dari target penerimaan pada DIPA yang senilai Rp. 9,359,130,000. Hal ini mempengaruhi realisasi belanja pada kegiatan-kegiatan yang memiliki sumber dana dari PNBPN/BLU. Selain itu, kondisi sumber penerimaan yang masih didominasi oleh Layanan Pengujian sehingga diperlukan upaya pemasaran dan pengembangan layanan untuk meningkatkan permintaan terhadap layanan jasa lainnya.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah perlu dilakukan optimalisasi aktifitas yang mendukung pencapaian target keuangan dan layanan jasa yang sebelumnya tertunda dan tidak tercapai. Selain itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antar tim kerja untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pencapaiannya membutuhkan peran dari masing-masing tim kerja.

Demikian laporan triwulan II tahun 2025 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda. Semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi Badan standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, maupun pihak terkait.

LAMPIRAN

REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN II TA. 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut				
						% Fisik		Kegiatan									
						Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi								
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,66	Indeks	3,86	105,46%	48%	50%	B4	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B4	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan	Pelaksanaan survei yang masih menggunakan metode konvensional pada beberapa layanan jasa sehingga tingkat partisipasi responden belum mencakup semua pengguna jasa. Selain itu, minimnya pengisian suevei karena kurangnya pengetahuan responden akan pentingnya dilakukan survei kepuasan masyarakat dan keterbatasan SDM responden dalam melakukan survei	Mengupayakan tersedianya sistem survei terhadap seluruh jenis pelayanan melalui sistem informasi serta dilakukan sosialisasi pentingnya survei kepuasan masyarakat melalui sosial media, serta himbauan langsung kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan jumlah responden	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan III-IV
										B5	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B5	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan				
										B6	a) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat b) Pemantauan website, sosial media, dll terkait pengaduan pelanggan c) Melakukan penyelesaian pengaduan pelanggan sesuai target	B6	a) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui SILABISA. b) Pemantauan pengaduan pelanggan c) Melakukan analisis hasil survei kepuasan pelanggan kepada responden yang memberi nilai di bawah 3,66				
		TJ.2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	210	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	182	86,67%	50%	80%	B4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan, Konsultasi, dan Pembinaan SDM Industri	B4	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pengajuan akreditasi LSSM dan persiapan dokumen LHP Utama c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga	Order pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan layanan narasumber / pengajar pada periode triwulan II masih sangat sedikit	Meningkatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah Industri yang menggunakan jasa layanan. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan III-IV
										B5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang	B5	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi				
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	konsultasi industri. b) Proses audit LSSM dan persiapan dokumen LPH Utama c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga				
									B6	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi b) Melakukan pengembangan lingkup untuk parameter aneka komoditi serta monitoring jumlah perusahaan/pelaku usaha/instansi pada layanan SILABISA c) Pelaksanaan layanan Pendampingan dan Konsultasi d) Pelaksanaan layanan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi produk	B6) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Pelaksanaan witness dan pengajuan akreditasi LPH ke BPJPJ c) Persiapan dokumen teknis untuk parameter yang akan diakreditasi d) Monitoring jumlah perusahaan industri pada layanan SILABISA e) Pembuatan Database Industri potensial guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan serta memberikan inovasi program promosi penawaran harga				
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	SK.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	86,00	Persen	96,48	112,19%	50%	50%	B4 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B4 Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling	Keterbatasan jumlah peralatan pengambilan contoh serta kalibrasi mengakibatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sampling menjadi terganggu. Selain itu komunikasi yang kurang efektif antar personel terkait sistem di SIL mempengaruhi pencapaian sasaran mutu. Selanjutnya, penyelesaian terhadap beberapa jenis sampel dengan karakteristik yang berbeda membutuhkan	Diperlukan Kerjasama dari semua pihak pencapaian target penyelesaian layanan jasa teknis sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Diperlukan juga perencanaan dalam pengadaan peralatan, bahan kimia, bahan pendukung pengujian,perencanaan penjadwalan sampling serta perencanaan kalibrasi dan	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi	Triwulan IV
										B5 a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring	B5 Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut				
								% Fisik		Kegiatan									
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi			
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14		
											capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan			waktu penyelesaian yang panjang. Kemudian, modernisasi peralatan laboratorium baik untuk peralatan pendukung proses maupun proses belum sepenuhnya dilakukan. Dan terakhir, terbatasnya sumber daya untuk melakukan pengujian dan kalibrasi parameter diluar lingkup yang sudah diuji	pemeliharaan peralatan sehingga kegiatan layanan dapat berjalan dengan lancar				
										B6	a) Pelaksanaan setiap layanan sesuai prosedur yang ditetapkan b) Melakukan monitoring capaian SLA setiap layanan pada aplikasi layanan SIL secara kontinu c) Melakukan kegiatan monitoring persediaan bahan kimia, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan	B6	Melakukan monitoring capaian pelayanan sesuai SLA pada silabisa, memonitor pengadaan bahan kimia, pemeliharaan peralatan, dan jadwal sampling						
		SK.1.2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	6,00	Nilai					48%	50%	B4	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B4	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)	Pelaksanaan survey Net Promotore Score masih dilakukan secara manual menggunakan media WhatsApp sehingga responden memberikan jawaban secara sukarela, sehingga jumlah responden belum maksimal sesuai dengan jumlah pengguna jasa yang dilayani	Pelaksanaan survei dapat dilakukan menggunakan sistem survei melalui aplikasi SILABISA	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan IV
												B5	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B5	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)				
												B6	Promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial	B6	a) Melakukan promosi dan pemasaran layanan baik dengan kunjungan langsung maupun promosi layanan melalui media sosial b) Melakukan Survei Net Promoter Score (NPS)				
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	SK.2.1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9,22	Persen			50%	50%	B4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan	B4	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultansi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi	Sumber penerimaan masih didominasi oleh layanan pengujian	Perlu ditingkatkan lagi proporsi pendapatan layanan jasa selain jasa pengujian	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi	Triwulan III-IV		

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut			
							% Fisik		Kegiatan								
							Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi							
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA	kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order			Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri			
										B5	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA					B5	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order
										B6	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di aplikasi SILABISA					B6	a) Pelaksanaan layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi industri. b) Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah PNBP c) Melakukan pengembangan parameter aneka komoditi d) Melakukan inventarisasi dan evaluasi kontrak kerjasama serta memberikan penawaran harga dan evaluasi jumlah penawaran yang menjadi order
		SK.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	4545	Hasil Layanan	2358	51,88%	50%	50%	B4	a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil	B4	a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media	Permintaan layanan masih didominasi oleh layanan pengujian	Perlu ditingkatkan lagi proporsi permintaan layanan jasa selain jasa pengujian	Tim Kerja Pengujian dan Kalibrasi, Tim Kerja Standardisasi dan Sertifikasi, dan Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Tim	Triwulan III-IV

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan					
								Target Antara	Realisasi	Rencana					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										layanan jasa industri di aplikasi SILABISA				Kerja Pengembangan Jasa Industri	
										B5 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B5 a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media				
										B6 a) Melakukan penambahan lingkup parameter yang terakreditasi dan parameter aneka komoditi b) Melakukan pengembangan lingkup layanan kalibrasi c) Pelaksanaan layanan jasa industri d) Melakukan monitoring terhadap jumlah hasil layanan jasa industri di aplikasi SILABISA	B6 a) Melakukan monitoring jumlah layanan pada aplikasi SILABISA b) Melakukan penambahan dan perluasan ruang lingkup layanan c) Koordinasi dengan stakeholder melalui kunjungan/penjajakan kerjasama dan kemitraan d) Promosi sosial media				
		SK.2.3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	8,10	Persen	4,71	58,15%	45%	50%	B4 a) Lanjutan proses pengadaan Mebelair b) Proses Lelang Barang Inventaris Kantor c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	B4 a) Rincian kebutuhan meubelair telah ditentukan, namun pengadaan meubelair masih ditunda sambil menunggu ketersediaan anggaran b) Proses lelang BMN belum dilakukan karena masih menunggu surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Maret tahun 2025 kepada KPKNL	Proses pengadaan meubelair hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena terdapat kendala keterbatasan anggaran pada tahun berjalan. Selanjutnya, proses lelang Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilaksanakan karena surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal baru saja diterbitkan. Kemudian, usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2027 masih belum diajukan karena belum	Dalam proses lelang BMN, diharapkan dapat segera berjalan pada Triwulan III agar pemanfaatan dan pengelolaan BMN dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terkait usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun anggaran 2027, jika telah ada arahan dan jadwal resmi yang telah ditetapkan, maka satuan	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B5 a) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan Lelang Inventaris kantor b) Hunting Penyedia dan Koordinasi terkait pengadaan AC, dll	B5 a) Proses lelang BMN belum dilakukan karena surat persetujuan penjualan BMN dari Sekretaris Jenderal baru diterima di Bulan Mei. b) Proses pengadaan AC telah selesai dilaksanakan.				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi						
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL	c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan April tahun 2025 kepada KPKNL	adanya jadwal resmi dari Biro Keuangan mengenai pembukaan pengusulan RKBMN untuk tahun 2027	kerja akan segera menyusun dan mengajukan RKBMN sesuai dengan kebutuhan dan prioritas program kerja				
										B6	a) Pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan Gedung kantor tahap 2 b) Pengusulan RKBMN c) Penyampaian laporan pemanfaatan asset ke KPKNL					B6	a) Pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan Gedung kantor telah selesai dilaksanakan pada akhir bulan. b) RKBMN dalam proses persiapan penyusunan dan menunggu penjadwalan pengusulan RKBMN dari Biro Keuangan. c) Penyampaian laporan pengelolaan pendapatan BLU yang berasal dari pengelolaan BMN Bulan Mei tahun 2025 kepada KPKNL
		SK.2.4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	41,50	Persen	27,67	66,67%	50%	50%	B4	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU	B4	a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 8 April 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 29 April 2025 c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala	Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini	Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja secara tepat waktu setiap bulannya	Subbag Tata Usaha	Triwulan III-IV
										B5	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU	B5	a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 5 Mei 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 28 Mei 2025 c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala				
										B6	a) Membuat dan menyampaikan target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU b) Pengajuan pengesahan penerimaan & penggunaan	B6	a) Penyampaian target penerimaan dan penggunaan anggaran PNPB BLU ke PPK BLU pada tanggal 3 Juni 2025 b) Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan anggaran PNPB BLU pada Minggu ke IV yaitu pada tanggal 26 Juni 2025				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut	
								% Fisik		Kegiatan						
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										anggaran PNPB BLU pada minggu ke IV setiap bulannya c) Monitoring penagihan piutang PNPB BLU	c) Pelaksanaan monitoring penagihan piutang secara berkala					
4	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	82,96	Indeks	83,18	100,27%	50%	70%	B4	Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	B4 a) Pelaksanaan IHT Pemahaman Titik Proses Produksi Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena dan Pengendalian Mutu Produk pada tanggal 15 April 2025, yang diikuti oleh 16 orang peserta. b) Pelaksanaan IHT Pemahaman Titik Kritis Penetapan Halal untuk Barang Gunaan dan Jasa pada tanggal 22 - 23 April 2025, yang diikuti oleh 15 orang peserta.	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dalam rangka pencapaian IP ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan anggaran yang terbatas mengakibatkan perlu dilakukan seleksi terhadap pengajuan kegiatan pelatihan/ pengembangan kompetensi dengan mempertimbangkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan tersebut	setiap pegawai diarahkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara online yang dapat diikuti secara gratis. Hal ini juga dapat menjadi solusi agar kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dapat lebih merata keseluruh pegawai. Selanjutnya, terkait dengan progres nilai IP ASN yang akan disampaikan Biro OSDM, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Tim Kepegawaian OSDM terkait kesesuaian antara data pengembangan kompetensi yang diterima OSDM dengan data yang dilaporkan Tim Kepegawaian BSPJI Samarinda pada Intranew sebelumnya	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
									B5	Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan	B5 Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Pendaftaran Sertifikat Halal pada tanggal 23 Mei 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta.					
										B6	a) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengembangan layanan b) Evaluasi pelaksanaan pelatihan Triwulan II	B6 a) Pelaksanaan IHT Pengoperasian Alat Uji Isokinetik pada tanggal 10 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. b) Pelaksanaan IHT Pengujian Tangki Air Silinder Vertikal pada tanggal 17 -19 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. c) Pelaksanaan IHT Validasi Metode dan Pengujian Parameter Kualitas Tanah pada tanggal 23 - 24 Juni 2025, yang diikuti oleh 17 orang peserta. d) Pelaksanaan IHT Manajemen Risiko Sektor Publik pada tanggal 30 Juni 2025, yang diikuti oleh 10 orang peserta. e) Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Semester I dan penyusunan laporan pelaksanaannya				
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	SK.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00	Persen			40%	40%	B4	Melakukan persiapan pengembangan aplikasi SILABISA	B4 Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi	Integrasi data teknis cukup Kompleks sehingga butuh dilakukan penginputan dan penyesuaian data kembali pada sistem. Selanjutnya, dibutuhkan adanya penyesuaian sumber daya tim pengembang dalam hal teknis laboratorium, khususnva kebutuhan teknis	Perlu dilakukan sinkronisasi data pada aplikasi SILABISA yang akan dilakukan integrasi dengan sistem Informasi BSKJI	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan III- IV
										B5	Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA	B5 Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi				
										B6	Membuat Analisis Kebutuhan pengembangan aplikasi SILABISA	B6 Melakukan persiapan lanjutan pengembangan aplikasi SILABISA pada layanan jasa pengujian dan kalibrasi				

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II						Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana		Realisasi					
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9		10		11	12	13	14
														laboratorium dengan kemampuan teknis pemrograman			
		SK.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80,00	Persen			35%	35%	B4	Membuat data dukung LKE SPBE	B4	a) Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE b) Nota Dinas Penyampaian Notulensi Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE tanggal 18 Maret 2025 c) Pembuatan Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Aplikasi SILABISA	Pemenuhan data dukung LKE SPBE selain memerlukan proses konsultasi dengan Pusdatin dan Biro Perencanaan, hal ini merupakan tahapan yang baru bagi penanggung jawab SPBE di lingkungan BSPJI Samarinda. Pada triwulan II tim kerja Pengembangan Jasa Industri sebagai penanggung jawab indikator SPBE masih terkendala terkait kurangnya pemahaman tentang 38 item LKE SPBE dan serta tata cara pemenuhannya	Perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM untuk mengumpulkan data dukung dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II - IV
		B5	Membuat data dukung LKE SPBE	B5	a) Penyampaian Notulensi Rapat Konsultasi Pembangunan Aplikasi SPBE tanggal 22 April 2025 b) Merevisi Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Aplikasi SILABISA												
		B6	Membuat data dukung LKE SPBE	B6	Mengikuti rapat Konsultasi Aplikasi SPBE												
		SK.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,51	Indeks	4,68	103,77%	40%	50%	B4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	B4	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan	Adanya keterbatasan sumber daya termasuk kompetensi personel dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan layanan publik	Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan dalam Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik. Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan nilai indeks pelayanan publik	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II - IV
		B5	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM	B5	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan												
B6	a). Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik	B6	a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik b) Pelaksanaan reward & punishment														

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi						
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										b) Pelaksanaan reward & punishment c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan e) Penyusunan perubahan SPM	c) Tersedia sistem informasi pelayanan publik yang update d) Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan						
6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	SK.5.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	50,00	Persen			80%	100%	B4	Mereviu Laporan hasil Pemeriksaan Audit Kinerja	B4	a) Pada tanggal 10 April telah disampaikan matrik tindak lanjut audit kinerja TA. 2024 beserta dokumen pendukung melalui surat kepada Inspektur Jenderal Wilayah III	Tidak ditemukan kendala dalam pemenuhan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	Melakukan koordinasi dengan tim APIP terkait surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit yang telah disampaikan. Selanjutnya, terkait pelaksanaan kinerja tahun 2025, tetap dilakukan koordinasi dengan tim APIP secara berkelanjutan apabila dirasakan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan di keuangan	Subbag Tata Usaha	Triwulan III
B5										Menyelesaikan saran-saran tindaklanjuti audit kinerja yang tercantum dalam LHP	B5	Menunggu Surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Inspektur Jenderal Wilayah III					
B6										Penyampaian hasil tindak lanjut audit kinerja ke Sekretariat Inspektorat Jenderal	B6	Menunggu Surat balasan atas penyampaian tindak lanjut hasil audit dari Inspektur Jenderal Wilayah III					
		SK.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	95,00	Nilai			50%	60%	B4	a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan penyimpanan arsip aktif di Ruang Central File	B4	a) Menerima Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke Unit Kearsipan berdasarkan fungsi satker b) Membuat berita acara pemidahan arsip inaktif berdasarkan fungsi satker c) Menginput daftar arsip inaktif yang dipindahkan berdasarkan fungsi satker	Tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya		Monitoring berkala untuk kegiatan pada bulan berikutnya	Triwulan III
B5										a)nPengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar melalui penerapan SRIKANDI b) Melakukan pengelolaan arsip vital c) Melakukan perlindungan arsip vital	B5	a) Melakukan penataan arsip inaktif berdasarkan asal usul dan asas aturan asli berdasarkan fungsi satker b) Melakukan pengaturan fisik arsip inaktif					
B6										a) Pengadministrasian tata naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar	B6	a) Menginput daftar berkas arsip inaktif berdasarkan klafikasi mewakili seluruh fungsi satker					

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
										melalui penerapan SRIKANDI b) Pemberkasan arsip aktif melaui penarapan SRIKANDI c) Menginput daftar arsip aktif	c) Menginput daftar isi berkas arsip inaktif bedasarkan klafikasi mewakili seluruh fungsi satker						
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	SK.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	80,50	Nilai	85,40	106,09%	50%	80%	B4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Renstra 2025-2029	B4	a) Penyusunan Laporan PP39 TW 1 b) Penyusunan Konsep Renstra 2025-2029	Dalam pemenuhan dokumen untuk penilaian SAKIP telah diupayakan dengan maksimal	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Jenderal pada Triwulan III dan IV	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
B5										a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026 b) Penyusunan RBA 2026 definitive	B5	a) Reviu Internal KAK RAB dan data dukung TA. 2026					
B6										a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2 c) Pelaporan Monev BAPPENAS	B6	a) Penyesuaian Pagu Indikatif TA. 2026 b) Rapat Monev TW 2.					
SK.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,18	Nilai	96,69	102,67%	48%	50%	B4	a) Pelaporan CAPUT Maret b) Revisi DIPA TW 2 Pemutakhiran RPD (maks 10 April) c) Pengesahan Penerimaan dan Belanja April d) Pengajuan GUP April	B4	a) Pelaporan Caput Maret 2025 dilakukan pada tanggal 11 April 2025 b) Pengajuan Usulan Revisi Pemutakhiran Hal III dilakukan pada tanggal 15 April 2025 c) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan pada Minggu ke IV pada tanggal 29 April 2025 d) Tidak Ada Pengajuan GUP di bulan April, dikarenakan UP telah dinihlkan pada tanggal 6 Maret 2025	Pelaksanaan anggaran juga belum dapat berjalan maksimal dikarenakan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat akibat menunggu proses revisi DIPA terkait relaksasi blokir belanja. Kondisi ini juga mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran sepanjang triwulan ini sehingga berdampak pada pencapaian aspek "Deviasi Halaman III DIPA" dan "Penyerapan Anggaran"	Perlu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran agar sebisa mungkin dapat mengikuti perencanaan (RPD) sehingga dapat mempertahankan nilai "Deviasi Halaman III DIPA" yang tidak terlalu besar deviasinya. Selain itu, aspek "Penyerapan Anggaran" juga perlu diperhatikan agar dapat lebih dimaksimalkan melalui penggunaan saldo BLU sambil menunggu penerimaan PNPB setiap periodenya	Subbag Tata Usaha	Triwulan III	
									B5	a) Pelaporan CAPUT April b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Mei c) Pengajuan GUP Mei	B5	a) Pelaporan Caput April 2025 dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 b) Telah dilakukan Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan pada Minggu ke IV pada tanggal 28 Mei 2025					
									B6	a) Pelaporan CAPUT Mei b) Pengesahan Penerimaan dan Belanja Juni c) Pengajuan GUP Juni d) Monev Penyerapan Anggaran TW 2	B6	a) Pelaporan Caput ke KPPN Bulan Mei 2025 dilakukan pada tanggal 4 Juni 2025 b) Pengesahan dilakukan tanggal 26 Juni 2025 c) Pelaksanaan Rapat Monev TW II pada tanggal 10 Juni 2025					

No.	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan II				Kendala	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab Tindak Lanjut	Target Penyelesaian Tindak Lanjut		
								% Fisik		Kegiatan							
								Target Antara	Realisasi	Rencana						Realisasi	
1	2	3		4,00		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	Terwujudnya SDM yang profesional	SK.7.1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	80,00	Persen	54,80	68,50%	45%	50%	B4	Penyampaian laporan reviu pengadaan barang/ jasa Triwulan I 2024	B4	Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa	Masih minimnya realisasi persentase penggunaan produk dalam negeri, yang disebabkan perhitungan persentase hanya diambil berdasarkan 3 akun dari 15 akun terpilih yang bersumber dari Rupiah Murni	Melakukan monitoring secara berkala setiap bulannya terhadap realisasi pengadaan barang/jasa	Subbag Tata Usaha	Triwulan IV
										B5	Koordinasi pelaksanaan pengadaan tambahan alat laboratorium	B5	Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I sebesar Rp 147.160.000 yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa				
										B6	Monitoring capaian penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I dan monitoring progress usulan izin impor	B6	Tercapainya penggunaan PDN pada pengadaan barang/ jasa sampai semester I sebesar Rp.196.160.000 yang terdiri dari pengadaan terdiri dari belanja barang dan belanja jasa				
Rata-rata						87,48%	49%	56,76%									

TABEL MONITORING RINCIAN OUTPUT JANUARI-JUNI 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVRO	RVRO	Progres	TW 1		April		Mei		Juni	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEC Kerja sama	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	154,899,000	126,754,000	73.98%	5	4	45.00%	4	21%	0	8%	0	8%	0	8%
2			AEF Sosialisasi dan Diseminasi	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	629,133,000	251,340,000	29.04%	500	272	48.00%	145	24%	40	8%	45	8%	42	8%
3			BAD Pelayanan Publik kepada industri	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,518,360,000	1,518,360,000	37.99%	300	237	46.80%	126	20.5%	29	9%	45	8.50%	37	8.8%
4				Jasa pelayanan teknis kalibrasi	168,664,000	168,664,000	9.19%	29	5	44.50%	1	20%	0	9%	1	8.50%	3	7%
5				Jasa pelayanan teknis sertifikasi	481,955,000	392,393,000	23.46%	44	8	40.00%	3	15%	1	5%	2	10%	2	10%
6				Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	184,472,000	184,472,000	19.58%	13	5	31.00%	2	6%	0	1%	1	12%	2	12%
7			BDI Fasilitas dan Pembinaan Industri	Pemanfaatan Teknologi Industri	320,522,000	320,522,000	15.86%	10	9	24.10%	1	5%	1	2%	1	8.50%	6	8.60%
8			CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan	2,007,500,000	1,185,786,000	9.88%	59	18	52.00%	0	9%	0	0%	3	33%	15	10%
			Total EC		5,465,505,000	4,148,291,000	25.44%											

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan s/d Juni	TVRO	RVRO	Progres	TW 1		April		Mei		Juni	
											RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
9	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	150,000,000	150,000,000	0.00%	1	0	50.00%	0	19.5%	0	9%	0	13.30%	0	8.20%
10				Layanan Perkantoran	12,626,995,000	11,978,668,000	55.98%	1	0	50.00%	0	25.5%	0	8%	0	8.50%	0	8%
11			EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	621,000,000	238,374,000	56.02%	37	12	57.00%	0	18%	4	13%	4	13%	4	13%
12			EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	532,806,000	292,986,000	28.61%	52	44	50.00%	24	20%	10	10%	5	10%	5	10%
13			EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	87,370,000	-	0.00%	1	0	48.00%	0	20%	0	8%	0	12%	0	8%
14				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	71,110,000	-	0.00%	1	0	48.00%	0	20%	0	8%	0	12%	0	8%
15				Layanan Manajemen Keuangan	75,500,000	-	0.00%	2	1	48.00%	1	20%	0	8%	0	10%	0	10%
16				Layanan Reformasi Kinerja	24,800,000	24,800,000	25.00%	1	0	39.00%	0	20%	0	5%	0	7%	0	7%
17				Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,400,000	1,400,000	0.00%	1	0	50.00%	0	20%	0	9%	0	12%	0	9%
Total WA					14,190,981,000	12,686,228,000	54.62%											
Total					19,656,486,000	16,834,519,000	47.43%											

TRIWULAN II
2025



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#539081

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2025
 K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 UK. Eselon I : 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	150,000,000	0	0.00%							
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi		1	0	150,000,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Rencana Pengembangan SILABISA	50.00		Belum	Anggaran	PNBP masih digunakan untuk memenuhi kegiatan yang lebih prioritas
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	12,626,995,000	6,352,801,112	50.31%							
2	001 Gaji dan Tunjangan		1	1	8,218,073,000	5,019,038,456	61.07%	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juni	50.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	1	4,408,922,000	1,333,762,656	30.25%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan operasional balai	50.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Proses revisi anggaran terkait efisiensi belanja
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	37	12	621,000,000	126,349,978	20.35%							
4	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		37	8	290,000,000	43,849,972	15.12%	Pelaksanaan	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	57.00	8 Unit	Sudah	Anggaran	Proses pengadaan menunggu tercapainya PNBP
5	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		37	4	331,000,000	82,500,006	24.92%	Pelaksanaan	Proses menunggu tercapainya PNBP untuk pengadaan peralatan pengolah data	57.00	4 Unit	Sudah	Anggaran	Ketersediaan Sumber Dana BLU dan Blokir Anggaran

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	52	44	532,806,000	69,938,081	13.13%							
6	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		52	44	532,806,000	69,938,081	13.13%	Pelaksanaan	Pelaksanaan pelatihan di bulan Juni	50.00	44 Orang	Sudah	Anggaran	Adanya Sub Kompenen yang seluruh anggarannya di Blokir
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	1	0	87,370,000	0	0.00%							
7	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		1	0	87,370,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan anggaran tahun 2025	48.00		Belum	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	1	0	71,110,000	0	0.00%							
8	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		1	0	71,110,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Monev bulan Juni	48.00		Belum	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	2	1	75,500,000	0	0.00%							
9	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	1	75,500,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan terkait keuangan	48.00	1 Layanan	Sudah	Anggaran	Anggaran di Blokir
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	1	0	24,800,000	6,200,000	25.00%							
10	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		1	1	24,800,000	6,200,000	25.00%	Pelaksanaan	Pembayaran Honor SPI	39.00	1 Dokumen	Sudah	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6042.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		Dokumen	1	0	1,400,000	0	0.00%							
11	051 Penyelenggaraan Kearsipan		1	0	1,400,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan terkait kearsipan	50.00		Belum	Anggaran	Tidak ada permasalahan
6077.AEC.002 - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis		Dokumen	5	4	154,899,000	93,769,992	60.54%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
12	051 Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	Dokumen	5	4	154,899,000	93,769,992	60.54%	Pelaksanaan	Penjajakan kerjasama ke Industri/Perusahaan	48.00	4 Dokumen	Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Penjadwalan kunjungan penjajakan kerjasama
6077.AEF.001 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis		orang	500	272	629,133,000	72,998,939	11.60%							
13	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	Orang	500	272	629,133,000	72,998,939	11.60%	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemenuhan kebutuhan di Unit Pelayanan Publik	48.00	272 Orang	Sudah	Anggaran	Ketersediaan sumber dana BLU
6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian		Industri	300	237	1,518,360,000	538,266,130	35.45%							
14	056 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001	SMM	1	1	75,640,000	21,806,128	28.83%	Pelaksanaan	Pengembangan Ruang Lingkup pada Layanan Jasa Pengujian	46.80		Sudah	Waktu	Proses Akreditasi penambahan Ruang Lingkup Layanan Jasa Pengujian
15	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Industri	300	237	1,442,720,000	516,460,002	35.80%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian	46.80	237 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Pengujian
6077.BAD.024 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi		Industri	29	5	168,664,000	15,504,000	9.19%							
16	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi	SMM	1	0	77,164,000	0	0.00%	Pelaksanaan	Perencanaan Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi	44.50		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Penyusunan Jadwal Pengembangan Ruang Lingkup Kalibrasi dengan Tim Akreditasi
17	051 Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi	Industri	29	5	91,500,000	15,504,000	16.94%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi	44.50	5 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Kalibrasi
6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi		Industri	44	8	481,955,000	88,456,660	18.35%							
18	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Industri	44	8	82,569,000	22,685,400	27.47%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi	40.00	8 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Sertifikasi

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
19	052 Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk	SMM	1	1	399,386,000	65,771,260	16.47%	Pelaksanaan	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi	40.00		Sudah	Waktu	Pengembangan Ruang Lingkup Layanan Jasa Sertifikasi
6077.BAD.058 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		Industri	13	5	184,472,000	36,128,210	19.58%							
20	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	Industri	13	5	184,472,000	36,128,210	19.58%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Jasa Pendampingan Industri	31.00	5 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Pendampingan Industri
6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri		Industri	10	9	320,522,000	43,336,000	13.52%							
21	051 Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	Industri	10	9	320,522,000	43,336,000	13.52%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultasi	26.00	9 Industri	Sudah	Waktu	Pelaksanaan Layanan Jasa Konsultasi
6077.CAH.021 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan		Unit	59	18	2,007,500,000	117,172,000	5.84%							
22	051 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Unit Paket	59	18	2,007,500,000	117,172,000	5.84%	Pelaksanaan	Pengadaan peralatan Laboratorium	52.00	18 Unit	Sudah	Anggaran	Menunggu penerimaan PNBP

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda



Risetio Canggih Dwiputra



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas